



ZSL
LET'S WORK
FOR WILDLIFE

**MENYIBAK JALAN MEMANGGUL BEKAL
LANGKAH BIJAK MENDAMPINGI USAHA
PERHUTANAN SOSIAL**





ZSL
LET'S WORK
FOR WILDLIFE

Menyibak Jalan Memanggul Bekal: Langkah Bijak Mendampingi Usaha Perhutanan Sosial

EDWIN MARTIN



**Menyibak Jalan Memanggul Bekal:
*Langkah Bijak Mendampingi Usaha Perhutanan Sosial***

Penulis: Edwin Martin

Editor: Didik Suharjito, Satyawan Sunito, Nur Arifatul Ulya,
David Ardhan

Penyunting: Fikty Aprilinayati E., Masayu Yulien Vinanda

Desain Sampul dan Tata letak: Rahman

Kontributor Foto: Efendi Agus Waluyo, Satyawan Sunito

Cetakan pertama, Juni 2020

Hak cipta teks dan lay-out

©ZSL Indonesia dan KLHK

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh ZSL Indonesia

ISBN: 978-623-95317-3-7

DISCLAIMER

Proses penyusunan buku Regu Peduli Air, sebagian besarnya berbasis kajian pustaka dan pengalaman para penulis, kemudian dikonfirmasi dengan kasus lapangan. Kasus lapangan yang diangkat adalah areal kerja Perhutanan Sosial Kemitraan Gapoktanhut Berkah Hijau Lestari dan KPH Lalan Mendis (Dishut Prov Sumatera Selatan). Lokasi tersebut meskipun dalam satu bentang hidrologis dengan Taman Nasional Berbak Sembilang (UPT KSDAE), namun berada cukup jauh dari kawasan Taman Nasional. Para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, selain para peneliti Balai Litbang LHK Palembang (UPT BLI Kemen-LHK) dan KPH Lalan Mendis, juga pihak Manggala Agni Daops Musi Banyuasin (sebelumnya dibina oleh BKSDA Sum-Sel/KSDAE). Akan tetapi pihak TN Berbak Sembilang dan BKSDA Sumsel selalu dilibatkan dalam proses diskusi tingkat provinsi oleh project KELOLA Sendang.

DARI PENULIS

Meskipun fasilitasi merupakan salah satu agenda wajib dalam Perhutanan Sosial (PS), namun pada kenyataannya di lapangan tidak berjalan sebagaimana diinginkan. Kendala utama pemerintah dan pemerintah daerah melakukan fasilitasi adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Karenanya, peran pendampingan seringkali dilakukan oleh LSM. Namun, tidak semua unit PS dapat didampingi oleh LSM. Selain itu, pendampingan yang dibatasi oleh waktu tertentu seringkali menjadikan program yang telah direncanakan bersama menjadi mandeg. Padahal, mendampingi/ menggerakkan sebuah unit PS yang mengelola lanskap bukanlah pekerjaan instan.

Buku ini menawarkan pemahaman tentang Perhutanan Sosial Indonesia, tentang peran penting pendampingan, tentang kerangka kerja pendampingan yang disertai teladan tiga kasus unit PS yang berbeda secara kontekstual. Alih-alih memberikan petunjuk teknis pendampingan PS, buku ini menyajikan prinsip-prinsip utama dalam mendampingi/ menggerakkan unit-unit PS. Energi utama pendampingan adalah gagasan yang tak pernah kering. Gagasan muncul dari literasi dan sikap belajar tiada akhir.

Gagasan AGILE K3 TranS SC² merupakan pemikiran yang muncul dari khasanah kekayaan ilmu pengetahuan yang telah dibahas dan disampaikan masyarakat ilmiah dan pengalaman empiris penulis, yang kemudian ditantang untuk mendampingi unit PS yang lebih kental problematikanya dibandingkan potensi sumber daya. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Proyek KELOLA Sendang yang telah memberikan kesempatan untuk untuk belajar bersama. Kepada Ibu Prof. Damayanti Buchori, Mas David Ardhian, Mas Devis Rachmawan, Mas Sardi Winata, dan Mas Agus Irwanto Wibowo atas kesempatan, tantangan, diskusi yang hangat, dan fasilitasi selama kerja-kerja lapangan dan penulisan buku ini.

Kesempatan melihat, mendengarkan, berpikir, dan merenungkan gagasan-gagasan dalam buku ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan, bantuan, dan kebaikan kolega penulis. Kepada Bapak Ir Tabroni, MM, Kepala Balai Litbang LHK Palembang, penulis haturkan ribuan terima kasih atas dukungan dan pembinaannya. Kepada kolega peneliti, para pendamping BHL Muara Medak, Mbak Dr. Nur Arifatul Ulya dan Mas Bondan Winarno terima kasih banyak atas kerja sama dan dukungannya. Kepada tenaga ahli HKm Meranti Wana Makmur Lubuk Bintialo, Mas Iman Muslimin. M.Sc terima kasih atas diskusi-diskusinya di lapangan. Kepada para peneliti dan pendamping luar biasa untuk Kemitraan Kehutanan KUD Sari Usaha Desa Karang Sari, Kang Dr. Mamat Rahmat, Mas Efendi Agus Waluyo, dan Kang Tubagus Angga Anugrah atas keakraban dan diskusinya. Juga kepada Mas Efendi Agus Waluyo yang telah memberikan informasi dan foto-fotonya.

Tak Lupa, penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para pihak di lapangan. Kepada Bapak Ir. Salim Jundan, M.Si dan para staf KPH Lalan Mendis atas kerja sama dan diskusi-diskusi di berbagai kesempatan. Kepada Kang Andre Saputra, pendamping Gapoktanhut BHL Muara Medak atas kerja-kerja lapangan dan bantuannya selama ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada para aktor di unit-unit PS, *local champions*, Pak Nanang Suharna dan Mas Edi Susanto di Dusun 7 Muara Medak, Mas Nur Rohim di Lubuk Bintialo, Pak Kusnadiono di Desa Karang Sari, dan banyak teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Maskarebet Palembang, Maret 2020

Edwin Martin

Mengenal kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku (KELOLA Sendang)

Sebagai proyek percontohan di tingkat lanskap, KS bertujuan untuk mengarusutamakan nilai-nilai konservasi pada pembangunan melalui pembangunan hijau yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi hutan dan lahan gambut, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, memperkuat kelembagaan yang dikombinasikan dengan pengembangan kebijakan yang semuanya diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan.

Tata kelola pendekatan lanskap menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memimpin (government-led) karena pendekatannya yang holistic dan mencakup aspek kebijakan yang menjadi pilar bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan di tingkat tapak. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Di tingkat pusat, proyek ini diarahkan oleh *Project Steering Committee* (PSC) yang terdiri dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel, Perwakilan Kabupaten, Perwakilan Konsorsium (ZSL) dan perwakilan lembaga donor (UKCCU). Komite Pengarah Proyek KELOLA Sendang ini berwenang untuk: mengesahkan Rencana Induk Proyek KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per-tahunnya (project milestones); mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan proyek; memastikan kegiatan proyek terkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional, lembaga donor, dan sektor swasta yang relevan selama

proyek berlangsung; dan mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan/ kemajuan proyek.

Di tingkat provinsi, Proyek KELOLA Sendang bermitra dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim *Project Supervisory Unit* dan *Project Implementation Unit* (PSU/ PIU) KELOLA Sendang. Tim ini dibentuk dengan SK Gubernur Sumatera Selatan 332/KPTS/BAPPEDA/2017. Anggota dari tim ini adalah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Selatan yang terkait langsung dengan pengelolaan Lanskap dan perwakilan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Tim ini bekerjasama dengan proyek dalam perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan proyek di Lanskap Sembilang Dangku.

Keterlibatan pemerintah juga menjadi penting bagi keberlanjutan dari kegiatan di tingkat tapak dengan memasukkan program kedalam RPJMD. Landscape governance yang dimaksud disini adalah keberadaan sebuah "*governing body*" di tingkat lanskap yang menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat-daerah, lintas sektor dimana semua isu terkait lanskap bisa dibicarakan bersama. Perencanaan yang disusun oleh PSU/ PIU melalui diskusi dengan multipihak, dituangkan dalam dokumen Masterplan KELOLA Sendang 2018-2020 yang disahkan oleh PSC pada tahun 2018.

DAFTAR ISI

DISCLAIMER.....	3
DARI PENULIS.....	4
TENTANG KELOLA SENDANG.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR TABEL	11
1. Pendahuluan.....	12
1.1 Tujuan	14
1.2. Organisasi buku.....	15
2. Perhutanan Sosial Dunia: Beragam Istilah Satu Prinsip.....	17
2.1. Perkembangan Kebijakan Kehutanan.....	17
2.2. Evolusi Community Forestry	19
2.3. Sumbang Saran Global untuk Kesuksesan PS: Salah Satu Bekal.....	23
3. Perhutanan Sosial Indonesia.....	25
3.1. Dari <i>'Forest for People'</i> Menuju Jalan Kesejahteraan Rakyat.....	25
3.2. SK PS Memberi Kepastian, Manfaat harus Diusahakan ...	28
3.3. Pendampingan, Pemberdayaan dan Inovasi.....	29
4. AGILE K3 TRANS SC2: Bekal Pendampingan Masyarakat dalam Mengelola SDA.....	32
4.1. AGILE Suatu Pendekatan Pendampingan	32
4.2. K3 – Komoditi, Kontrol dan Kultur	35
5. BHL Muara Medak: Berjuang Mengelola Problematika Lahan Gambut	42

5.1. Mencermati Lanskap: Kompleksitas Kehidupan Lahan Gambut	42
5.2. Transformasi Lanskap: Kelahiran Regu Peduli Air (REPAIR) Gambut.	48
5.3. Menjaga lanskap: Watak Air Adalah Berteman.	57
6. GAPOKTAN Meranti Wana Makmur: Perjuangan Menjadi Petani	62
6.1. Mencermati lanskap: Menjadi Petani Adalah Pilihan	62
6.2. Transformasi Lanskap: Dari Sisa Rimba Meranti Menuju Hutan Pangan.....	65
6.3. Menjaga Lanskap: Aksi Bersama Adalah Alat Komunikasi.....	67
7. KUD Sari Usaha: Harmoni Petani dan Kehidupan Alam Liar Hutan Bakau.....	70
7.1. Mencermati Lanskap: Maha Taman Lahan Basah	70
7.2. Transformasi Lanskap: Menata Lahan Basah Adalah Menata Manusia.	73
8. Epilog: Masyarakat Adalah Pembelajar Perhutanan Sosial Terbaik	78
LAMPIRAN	81
DAFTAR PUSTAKA	85
TENTANG PENULIS	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Ilustrasi keragaman inisiatif keterlibatan masyarakat dalam kehutanan ...	23
Gambar 2	Ilustrasi Perhutanan Sosial	29
Gambar 3	AGILE sebagai siklus berulang dari tindakan	33
Gambar 4	Saling keterkaitan antar elemen objek pengelolaan SDA	40
Gambar 5	Ilustrasi Pendamping PS dengan Kerangka Kerja AGILE K3 TransS SC ²	41
Gambar 6	Rumah lama SAD dengan jaring ikan	44
Gambar 7	Kanal melintasi rawa gambut, <i>ex illegal logging</i> , kini menghubungkan kebun sawit, kawasan perhutsos dan kampung SAD	47
Gambar 8	Kegiatan REPAIR	53
Gambar 9	Pelemah risiko kebakaran	61
Gambar 10	Lingkaran tidak berujung pangkal petani kecil	61
Gambar 11	<i>Mix farming</i> di Desa Lubuk Bintialo	64
Gambar 12	Penampilan salah satu lahan areal kerja HKm di Kampung TPB	65
Gambar 13	Rimba nipah menambah eksotisme lahan basah	72
Gambar 14	Koloni madu sialang di sekitar Sungai Sampan	74
Gambar 15	Lahan sawah yang ditanami <i>agroforestry</i> padi-jagung-jelutung	76
Gambar 16	Aliran pandangan pendamping/penggerak usaha PS dalam skema AGILE	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan global terkait hutan yang memengaruhi evolusi Periode CF	21
Tabel 2	K3 dan Aspek Berkaitan Yang Harus Diperhatikan	37
Tabel 3	AGILE, Peran, Tujuan dan Obyek kegiatan	38

1. PENDAHULUAN

Suara gemericik air dan kicauan burung kutilang (Pycnonotus aurigaster) mengiringi langkah kami, menjejakkan kaki di tengah rimba. Sinar mentari menyeruak malu-malu diantara rindangnya dedaunan pohon raksasa cemaghe (Altingia excelsa) dan medang bambang (Madhuca aspera). Rasa lelah hilang berubah syahdu, menyaksikan anakan entenam (Anisoptera marginata) tumbuh tegar disamping pokok bekas terbangannya induknya. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak, merebahkan diri di lantai hutan yang kering namun lembab, tidak jauh dari rumpun rotan manau (Calamus manan) yang ujungnya menjulang mengikuti alur pohon besar berdiameter lebih dari 200 cm, dari keluarga Lauraceae.

Pak RW semangat sekali menceritakan perjuangan warganya mempertahankan hutan ini, yang mereka sebut ghimbe larangan, ghimbe mude ayek, dari ancaman deforestasi yang datang justru dari kebijakan pemerintah dan oknum warga lokal. Meski diselingi lengkingan suara siamang (Symphalangus syndactylus) di kejauhan, dua orang pemuda lokal ikut menjelaskan fungsi dan peran hutan seluas kurang lebih 300 ha tersebut kepada kami. "Hutan ini menjaga sumber air bagi dusun kami", tegas Pak RW. Mereka sangat berharap negara hadir mendukung perjuangan mempertahankan sisa rimba ini, turut campur dalam menjaga sebutir mutiara hijau, di tengah lautan kebun kopi yang kian meluas. Tebat Benawa, Sabtu 7 Desember 2013.

Penggalan tulisan di atas merupakan catatan harian peneliti. Penyuluh, birokrat di lapangan, polisi, tentara, sarjana pendamping desa, aktivitis LSM, wartawan, peneliti, mahasiswa yang membuat tugas akhir, akademisi yang responsif dengan masalah riil masyarakat, milenial yang kagum dengan ikon-ikon unik di pelosok negeri yang *instagrammable*, kepala desa/ kepala dusun/ ketua RT/ ketua kelompok tani yang setiap hari berkuat dengan persoalan kepentingan umum, dan para peneliti memiliki pengalaman dan memori menyaksikan perjuangan orang/

sekelompok orang meningkatkan dan menjaga taraf hidup dan penghidupannya.

Membangun hutan dan menjaganya adalah bagian dari strategi penghidupan, terutama bagi masyarakat desa. Berada di tengah-tengah orang-orang itu, di depan atau di belakang mereka adalah tindakan menyenangkan, bermartabat, dan bermanfaat. Meskipun sepi, tidak nampak, dan penuh onak duri, menyibak jalan adalah kerja mulia. Kembali ke cerita di atas, pada akhir 2018, ghimbe/ hutan larangan Dusun Tebat Benawa secara resmi diakui dan dilindungi negara melalui Hutan Adat, salah satu skema Program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial (PS) menjadi program andalan pemerintah Indonesia, sejak tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, meskipun tidak menyebut istilah PS, memuat uraian sasaran peningkatan tata kelola hutan sebagai bagian salah satu agenda pembangunan nasional atau nawa cita “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Uraian tersebut menjelaskan bahwa angka 12,7 juta ha merupakan target pada tahun 2019 untuk peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/ HKm/ HD, hutan adat, dan HR, dari angka semula 500.000 ha. Upaya pencapaian target RPJMN itu kemudian diterjemahkan menjadi langkah-langkah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Dalam Renstra ini, PS menjadi program pemerintah dengan sasaran meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 memuat secara jelas istilah PS. Dalam RPJMN terbaru ini, PS merupakan salah satu strategi dalam arah kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa PS makin berkembang, dari sekedar kemitraan dengan masyarakat menjadi media untuk pengentasan kemiskinan. Sampai dengan 12 November 2019, realisasi PS telah mencapai 3,4 juta ha. Menurut RPJMN 2020-

2024, PS mencakup 3 (tiga) hal, yaitu legalisasi lahan, fasilitasi pemberdayaan skema PS (HD/ HKm/ HTR/ HA/ Kemitraan), dan pemberdayaan usaha masyarakat dalam skema PS.

Harapan yang besar terhadap PS ini menyisakan beberapa pertanyaan terkait peran dan masa depannya secara faktual. Apa sesungguhnya peran PS dari sisi konsep maupun praktik kekinian? Bagaimana mewujudkan cita-cita konsepsi PS di tengah tantangan perubahan dan keragaman tipe ekosistem, karakteristik masyarakat, dan dukungan para pihak?

1.1 Tujuan

Penulisan buku ini bertujuan untuk menyajikan rangkaian pengalaman pendampingan perhutanan sosial yang menggunakan pendekatan dan alat analisis berbasis pengelolaan lanskap oleh masyarakat. Meskipun buku ini mengambil 3 (tiga) contoh kasus perhutanan sosial di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai teladan inspiratif, namun secara umum terkandung maksud untuk:

1. Membuat semacam pedoman atau petunjuk yang tidak kaku, lebih tepat sebagai sumber inspirasi, bagi pendampingan program PS. Pendamping PS meliputi siapa saja yang ditugaskan, berminat, atau terpenggil untuk memfasilitasi, mengawal, memberi dorongan motivasi dan semangat, membuka jalan dan jaringan komunikasi pada setiap unit PS, agar ia berjalan sesuai tujuan secara konseptual maupun praktikal.
2. Menuliskan pengalaman berharga, respon para pihak, catatan-catatan penting di lapangan, dan pembelajaran dan yang dapat dipraktikkan ulang atau diperbaiki pada areal yang sama atau berbeda dalam konteks PS atau pengelolaan lanskap oleh masyarakat.
3. Menjadi rujukan bagi para mahasiswa, peneliti, akademisi, dan peminat peminat bidang PS, pemberdayaan masyarakat,

ekologi manusia, dan bidang ilmu terkait lainnya khususnya mengenai pendekatan dan alat analisis penelitian partisipatif yang lebih bernuansa transdisiplin.

1.2. Organisasi buku

Penyusunan buku ini dilakukan melalui beberapa tahapan reflektif, berupa studi pustaka, observasi lapangan, wawancara individu, diskusi kelompok, dan penyuntingan. Penulis merancang 8 (delapan) bab sebagai isi buku. Masing-masing bab berisi ide atau tema tertentu namun dalam satu kesatuan ide yang terangkai linier. Pembaca dapat membaca satu bab tertentu saja, tetapi sangat dianjurkan membaca keseluruhan sehingga dapat memahami ide utama buku.

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan. Bagian awal ini menyampaikan nilai penting program PS saat ini. Tujuan penulisan buku dan organisasi buku

Bab 2 menyajikan aspek kesejarahan perkembangan PS di dunia internasional dan sumbangan pemikiran konseptualnya.

Bab 3 menyampaikan perkembangan PS nasional dari sisi konsepsi, evolusi praktikal hingga tantangan kekinian. Bab ini juga menguraikan tentang perlunya pendampingan dalam usaha PS.

Bab 4 menyajikan pengenalan pendekatan dan kerangka kerja pengelolaan lanskap berkelanjutan oleh masyarakat, yaitu AGILE K3 TranS SC². Ini merupakan kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam memfasilitasi dan mengkaji PS. Sebagai pendekatan dan alat analisis, aspek keilmiah cenderung kental namun praktis. Penulis menawarkan AGILE K3 TranS SC² sebagai kristalisasi perenungan beragam referensi dan kerja empirik, untuk menjadi pendekatan dan alat analisis pengelolaan lanskap oleh masyarakat dalam cara dan gaya yang lebih sederhana. Ciri khas pendekatan AGILE K3 TranS SC² adalah mempertegas peran negara sebagai pengatur hubungan antara masyarakat dan sumber daya alam.

Bab 5 hingga Bab 7 merupakan teladan kasus-kasus pendampingan usaha PS Indonesia; untuk membedah dan melihat lebih dalam beragam konteks PS. Kasus pertama adalah unit PS yang menghadapi problematika lahan gambut. Kasus kedua merupakan unit PS yang hendak berjuang menjadi petani di tengah arus deras kapital. Kasus terakhir adalah sebuah deskripsi unit PS wilayah lahan basah. Penulis berperan sebagai fasilitator untuk kasus pertama dan hanya sebagai asesor atau peninjau untuk kasus kedua dan ketiga. Tokoh-tokoh yang penulis sebut dalam tiga kasus teladan ini tidak menggunakan nama sebenarnya, bahkan bisa disebut rekaan. Pembaca tidak perlu mencari siapakah sebenarnya tokoh-tokoh tersebut, karena pesan yang hendak disampaikan bukan pada subjek tetapi pada konteks-konteks dibalik cerita yang dilukiskan.

Bab 8 adalah epilog dari keseluruhan pemikiran buku ini. Perhutanan Sosial harus menjadi alat bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya dengan konteks sistem pengelolaan hutan. Setiap individu di masyarakat dimanapun dan dengan latar belakang apapun memiliki cita-cita atau harapan masa depan yang lebih baik. Negara harus menghormati asa mereka, memfasilitasinya untuk terwujud. Asa tersebut dicapai melalui penumbuhan tunas-tunas, berupa usaha-usaha berbasis pengelolaan lanskap yang lestari, mandiri, berpengetahuan dan berjejaring.

2. PERHUTANAN SOSIAL DUNIA: BERAGAM ISTILAH SATU PRINSIP

Terminologi *social forestry* pertama kali digunakan pada tahun 1976 oleh Komisi Nasional Pertanian, Pemerintah India. *Social forestry* (SF) adalah pengelolaan dan perlindungan hutan dan penghijauan tanah tandus dan gundul dengan tujuan membantu pembangunan lingkungan, sosial dan pedesaan”, demikian informasi yang dapat diperoleh secara cepat dari laman internet. Informasi yang lebih kaya dan luas akan didapatkan jika menggunakan kata kunci *community forestry*¹.

Sumber bacaan penting yang membahas sejarah, latar belakang, isu terkait, dan perkembangan *community forestry* (CF) dunia dapat ditelusuri dari tulisan FAO (1978), Arnold (1986, 1992, 2001) dan Gilmour (2016). Selain itu, FAO juga mengeluarkan perkembangan kehutanan global melalui buku berseri *State of the World's Forests*. Uraian berikut merupakan sebagian resume dari publikasi FAO tersebut, untuk membantu pemahaman tentang perhutanan sosial dunia.

2.1. Perkembangan Kebijakan Kehutanan

Di kebanyakan negara Sedang Berkembang, sering kali sebagai warisan kolonial, pemerintah merancang kebijakan yang terpusat dan sektoral untuk mengatur bagaimana sumberdaya hutan digunakan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang mengatur

¹ Mesin pencari google memberikan sekitar 710.000 hasil untuk kata kunci “social forestry”, 991.000 hasil untuk “community forestry”, dan 50.900 hasil untuk “community-based forestry” (28 Januari 2020)

penggunaan sumberdaya hutan ternyata lebih banyak memenuhi kepentingan pelaku-pelaku ekonomi besar dan membawa konsekuensi pada penyingkiran masyarakat lokal serta pada kerusakan lingkungan. Selain menumbuhkan tantangan dari masyarakat lokal yang hak-haknya disingkirkan, juga menumbuhkan pandangan baru mengenai tata-kelola hutan dan hubungan manusia dengan alam, yang menjadi tantangan bagi kebijakan sektor kehutanan dan pembangunan nasional di negara-negara tersebut.

Pada era 1980-an, negara-negara mulai mengakui bahwa hutan memiliki peran global dalam stabilitas biosfer, dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan dalam perlindungan terhadap budaya asli dan tradisional yang terancam. Pembuat kebijakan kehutanan mencari cara untuk menyeimbangkan harapan internasional yang berkembang mengenai peran hutan dengan apa yang disebut kepentingan pembangunan nasional.

Pada 1990-an, hutan menjadi fokus utama perdebatan kebijakan berkaitan dengan suatu konsep baru yaitu Pembangunan-Berkelanjutan. Konsep keberlanjutan meningkatkan ketegangan antara di satu pihak pertumbuhan ekonomi yang didorong pasar, tekanan sosial untuk distribusi peluang ekonomi yang lebih adil, dan di pihak lain kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas lingkungan, mempertahankan layanan ekologis, dan keanekaragaman hayati untuk memenuhi aspirasi ekonomi dan social yang berkelanjutan.

Pada era 2000-an, seiring perkembangan teknologi dan makin bertumbuhnya penduduk dunia, isu kehutanan makin kompleks dan cepat berubah. Mitigasi perubahan iklim dan konservasi keragaman biologis menjadi perhatian selanjutnya. Berkaitan dengan itu isu kemitraan dan kolaborasi dalam mengelola hutan juga turut memberi opsi dan tekanan kepada para pengambil kebijakan. Masalah-masalah global yang muncul dipertengahan dekade ini menyambungkan program nasional dengan upaya

pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, membangun prinsip-prinsip pengarah hutan tanaman, dan pengelolaan kebakaran.

Ragam tuntutan dan wacana disekitar tata-kelola hutan yang berkembang sampai dengan kini, nampaknya sejalan pula dengan 17 butir *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB pada tahun 2015 sebagai 'blue-print' bagi negara-negara untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Sehingga konsep Perhutanan Sosial (PS) dan Community Forestry (CF) dapat berperan sebagai salah satu wahana mencapai SDG's.

2.2. Evolusi Community Forestry

Pada awal 1970-an, pemerintah negara-negara di Asia cenderung memposisikan masyarakat pedesaan sebagai penyebab kerusakan hutan. Mereka dianggap memanen kayu bakar secara berlebihan, meliarkan ternak di dalam hutan dan mengkonversi lahan secara ilegal menjadi areal pertanian. Pemerintah melakukan nasionalisasi hutan, membatasi akses lokal dan hak-hak masyarakat, mengenalkan sistem pengelolaan hutan yang dilakukan pihak ketiga dan menggunakan pendekatan polisional. Ini berakibat menggusur budaya hutan yang berpusat pada masyarakat, menghilangkan tradisi yang bersumber pada penguasaan sumberdaya-alam bersama, dan pada gilirannya meninggalkan kerusakan hutan yang terus meningkat. Negara mengelola hutan dengan sistem *command and control*. Pertanian dan kehutanan dianggap terpisah. Padahal, selama ribuan tahun ekosistem pedesaan merupakan komponen tidak terpisahkan antara hutan, pertanian dan manusia. Ketahanan pangan, pendapatan, nutrisi, pekerjaan, sumber energi dan kesejahteraan keluarga pedesaan secara keseluruhan terkait erat dengan hutan. Konteks lahirnya konsep PS dan CF pada tahun 1970-an adalah krisis energi dan lingkungan di banyak negara Afrika dan Asia.

Kekeringan, Kelangkaan kayu bakar, dan kerusakan lingkungan di Afrika dan kejadian banjir di beberapa negara Asia dihubungkan dengan deforestasi dan degradasi tutupan hutan serta dipersepsikan sebagai dampak penggunaan sumberdaya yang tidak lestari. Hal ini mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai respons FAO dan Bank Dunia mulai mencurahkan perhatian pada usaha memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) penduduk pedesaan, antara lain kebutuhan energi – kayu bakar - di pedesaan. Konsepsi CF digaungkan antara lain dengan tujuan dan konteks mengatasi kelangkaan sumberdaya ini.

Salah satu publikasi FAO pada tahun 1978 mendefinisikan *Community Forestry (CF)* sebagai “*situasi apa pun yang secara intim melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan kehutanan*”. CF diasumsikan dapat merestorasi hutan di daerah yang hutannya sudah terdegradasi, agar kembali dapat menjadi sumber kayu bakar (energi), kebutuhan dasar rumah tangga dan ragam hasil hutan bagi industry pengolahan di pedesaan sebagai sumber pendapatan. Dalam kata lain CF, sebagai pendekatan baru, berusaha untuk mengintegrasikan kehutanan dan masyarakat ke dalam satu kerangka kerja kebijakan dan tindakan, terutama untuk daerah dengan kemiskinan endemik dan kondisi hutan yang rusak. Masing-masing negara memiliki istilah sendiri untuk pendekatan baru tata-kelola hutan ini, misalnya *Integrated Village Forestry* (China), *Social Afforestation System* (Ekuador), *Village Forestry* (India), *Farm Forestry* (Nigeria), *Smallholder Tree Farming* (Filipina), *Forest Village System* (Thailand). FAO dalam publikasi tentang *State of The World’s Forest* tahun 1995 menyebut CF sebagai istilah payung bagi beragam aktivitas partisipatif kehutanan di berbagai negara, namun semuanya sama di dalam melibatkan bentuk kehutanan yang didasarkan

pada kepentingan lokal dan tergantung pada partisipasi masyarakat. Reorientasi kebijakan dan program kehutanan ini bertujuan untuk mendukung kehutanan bagi masyarakat dan mendorong penduduk pedesaan untuk berpartisipasi dalam upaya kehutanan dan konservasi.

Program-program CF generasi pertama di awal tahun 1980an fokus pada reforestasi (reboisasi di Indonesia) dan aforestasi (penghijauan) di dalam rangka memberi sumberdaya baru bagi penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan subsistensi lokal melalui kegiatan penghijauan. Pendekatan CF generasi pertama ini mengalami banyak kegagalan karena diterapkan secara *top-down*. Generasi kedua CF di akhir tahun 1980an mengalami pergeseran fokus, kini menjadi pendekatan yang berpusat pada pemahaman strategi rumah tangga dalam menjaga kelestarian mata pencahariannya (*livelihood strategy*), melalui kontrol atas sumberdaya dan tanah kehutanan yang ada, dengan memanfaatkan kelembagaan lokal.

Pergeseran strategi tersebut, di tahun 1990 berlanjut dengan pemahaman bahwa hutan sebagai *common pool resources* tidak akan efektif bila dikelola secara terpusat oleh negara. Karena itu mulai menjadi pemahaman umum dan mewarnai kebijakan, bahwa diperlukan *devolusi* sumberdaya hutan kepada masyarakat lokal.

Tabel 1 Perkembangan global terkait hutan yang memengaruhi evolusi Periode CF

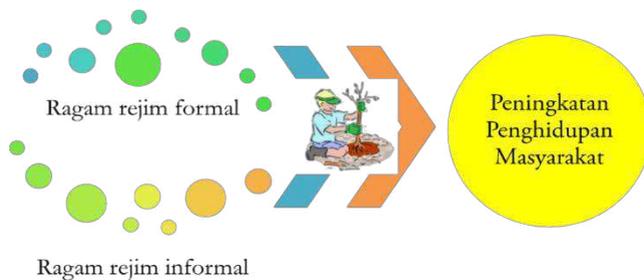
Periode	Peristiwa	Tanggapan
1970-an	<ul style="list-style-type: none"> • Krisis kayu bakar; • Kegagalan model pengembangan industri kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi kehutanan bagi pembangunan masyarakat lokal;

	<ul style="list-style-type: none"> • untuk mempertahankan hutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan hutan tanaman kayu bakar (umumnya <i>top-down</i>); Banyak kegagalan
1980-an	<ul style="list-style-type: none"> • Deforestasi skala luas; • Reformasi sektor kehutanan: kebijakan desentralisasi dan devolusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek-proyek percontohan di berbagai wilayah untuk menguji modalitas CF dalam mengatasi degradasi lingkungan • Kemunculan “partisipasi rakyat” dan pembangunan <i>bottom-up</i>.
1990-an	<ul style="list-style-type: none"> • Paradigma pembangunan berkelanjutan; • Pengakuan hak-hak masyarakat adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada Pengelolaan Hutan Lestari dan <i>livelihood</i> • Penguatan rezim CF yang memformalkan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola hutan • Ekspansi CF ke penjuru dunia.
2000-an	<ul style="list-style-type: none"> • Globalisasi, liberalisasi perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya minat untuk komersialisasi barang dan jasa, kayu dan bukan kayu yang dihasilkan CF
2010-an	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan global fokus pada perubahan iklim, kayu <i>illegal</i> dan imbal jasa lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan sasaran CF untuk mengakomodasi kepentingan kebijakan global.

Sumber: diadaptasi dari Gilmour (2016)

Perdebatan dan diskusi mendalam tentang istilah manakah yang lebih dapat menggambarkan inisiatif-inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam Kehutanan, CF atau SF, dibahas oleh Wiersum (1999). Wiersum mendefinisikan SF sebagai sebuah strategi pembangunan dari rimbawan profesional atau organisasi pembangunan lainnya dengan tujuan untuk merangsang keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam beragam aktivitas pengelolaan hutan skala kecil, sebagai cara untuk meningkatkan

kondisi penghidupan mereka. Sementara, CF diartikan sebagai semua aktivitas pengelolaan hutan yang dilakukan oleh penduduk pedesaan sebagai bagian dari strategi penghidupan mereka. Manakah yang lebih utama untuk menjadi perhatian, dengan membaca hasil analisis Wiersum (1999), SF atau CF? Jika dihubungkan dengan pendampingan PS di Indonesia, sebagaimana bahasan buku ini, maka SF adalah pintu masuk dan CF merupakan isi di dalamnya. SF dan CF dapat saling ditukarkan dan menggantikan, tergantung konteks dalam dimensi waktu dan lokalitas.



Gambar 1 Ilustrasi keragaman inisiatif keterlibatan masyarakat dalam kehutanan namun memiliki satu tujuan

2.3. Sumbang Saran Global untuk Kesuksesan PS: Salah Satu Bekal

Beragam bentuk CF/ SF / CBF, berdasarkan banyak hasil penelitian, akan menemui semua sasarannya bila memenuhi 6 syarat (Gilmour 2016). Persyaratan ini menjadi kunci-kunci yang digunakan secara keseluruhan untuk membuka pintu menuju keberhasilan. Kunci-kunci tersebut meliputi:

- Keamanan tenurial (hak-hak penguasaan);
- Kerangka kerja pengaturan yang masuk akal (keseimbangan yang wajar antara hak dan tanggung jawab);

- Tata kelola yang kuat;
- Teknologi yang layak untuk membangun dan memelihara produktivitas hutan;
- Pengetahuan pasar dan akses pasar untuk barang dan jasa;
- Budaya dan mandat birokrasi yang mendukung;

Laporan analisis situasi PS yang tersebar di wilayah Asia – Pasifik menunjukkan bahwa orang-orang akan mengkonservasi biodiversitas, mengurangi deforestasi dan mengelola hutan secara lestari ketika mereka mendapatkan manfaat secara terus menerus dan diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait hutan (RECOFTC 2013). Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan persyaratan berikut (diadaptasi dari RECOFTC 2013):

- Lebih banyak komunitas diberikan hak penguasaan atas hutan mereka
- Pemerintah memberikan masyarakat hak pengelolaan hutan yang dapat memberikan penghasilan, bukan lahan yang terdegradasi dan marginal.
- Penyederhanaan regulasi yang mengatur interaksi masyarakat dan hutan. Beragam aturan sering kali menjadi penghambat atau disinsentif bagi masyarakat untuk bertindak legal.

Perkembangan PS global sedikit banyak memengaruhi kebijakan dan praktik pengelolaan hutan di Indonesia. Diskursus global dalam bentuk konsep-konsep dan teladan-teladan praktik terbaik diadopsi dan diadaptasi menjadi kebijakan dan program PS di Indonesia. Pun sebaliknya, dinamika PS di Indonesia turut mewarnai cara pandang global tentang ilmu dan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

3. PERHUTANAN SOSIAL INDONESIA

3.1. Dari 'Forest for People' Menuju Jalan Kesejahteraan Rakyat

Tahukah anda cerita dibalik salah satu uang logam yang melegenda bagi rakyat Indonesia? Koin seratus rupiah bergambar gunung wayang tulisan melingkar "HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN" ini dikeluarkan pada tahun 1978. Uang tersebut dirilis untuk menghormati penyelenggaraan Kongres Kehutanan Dunia ke-8 di Jakarta pada tanggal 16– 28 Oktober 1978 dengan tema "Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat" (*Forest for people*). Kongres menghasilkan Deklarasi Jakarta tentang hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Deklarasi *forest for people* 1978 dianggap sebagai tonggak awal pengakuan pemerintah bahwa konsepsi Perhutanan Sosial (PS) patut dijadikan pertimbangan dalam pengurusan hutan (Suhendang 2004). Delapan tahun kemudian pada tahun 1986 istilah PS muncul pertama kali dalam program yang dirancang oleh Perum Perhutani, sebuah badan usaha milik negara yang meneruskan pengusahaan hutan warisan kolonial Belanda di Jawa (Kartasubrata 19885). Pada masa yang sama, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya membuat proyek percontohan PS. Semua proyek tersebut didukung oleh The Ford Foundation (Kartasubrata 1988).

Program PS Perum Perhutani di Jawa merupakan penyempurnaan program- program pendekatan kesejahteraan yang diawali sejak jaman kolonial Belanda (Suharjito, Khan, Djatmiko, Sirait, & Evelyns 2000), berupa intensifikasi system tumpang sari dan program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Perum Perhutani mendefinisikan PS sebagai *program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dengan tujuan meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya*.

PS yang menjadi program Perum Perhutani dilakukan dengan memberikan akses lahan negara kepada masyarakat dalam membangun hutan dengan sistem *agroforestry*, dan di luar kawasan dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH), untuk usaha produktif seperti peternakan, industri rumah tangga, dan perdagangan. PS juga diselenggarakan di lahan kawasan hutan yang dikuasai masyarakat dalam rangka penyelesaian sengketa.

Fisher et al. (2019) membagi periode perkembangan PS Indonesia menjadi tiga bagian. Generasi pertama (1970-an sd 1980-an) mengikuti periode pemerintahan Orde Baru, masih terbatas di pulau Jawa oleh Perum Perhutani. Bentuk pokok dari PS di Jawa ini adalah memberi akses penduduk pada kawasan hutan, sesuai dengan siklus pemanenan kayu dan penanaman kembali kawasan hutan. PS juga dilaksanakan di dalam rangka reboisasi kawasan hutan yang rusak, dengan pelibatan penduduk. Hak penduduk memanfaatkan kawasan hutan terus berkembang, dari terbatas pada tanaman musiman diantara tegakan tanaman kehutanan, bertambah dengan tanaman bagi kayu bakar, pemeliharaan madu, pengembangan pembenihan tanaman hutan oleh penduduk, penanaman rumput bagi ternak, dsb.

Generasi kedua PS (pertengahan 1990-an s.d. 2012), dimulai ketika rezim Orde Baru jatuh, menghasilkan periode reformasi dan restrukturisasi sistem politik. PS mendapat angin segar untuk bangkit pada saat pergantian rezim, namun di luar Jawa perkembangannya masih terhambat dengan dominannya *timber-based-management* dari kawasan hutan. Proses transisi PS pada masa generasi kedua ini, meskipun tertatih, merupakan pijakan untuk pergeseran selanjutnya yang lebih lincah. Niat untuk menjadikan PS sebagai alternatif sistem pengelolaan hutan dengan kekhasan pengelolaan oleh masyarakat justru muncul pada masa akhir generasi kedua ini.

PS generasi ketiga (2012 s.d. sekarang) dicirikan oleh perkembangan pesat pengajuan oleh para pihak dan percepatan perizinan oleh pemerintah. Telah menjadi umum bahwa PS adalah salah satu jalan menuju kesejahteraan rakyat. Permen LHK No. 83/ 2016, tentang perhutanan sosial, menyatakan “bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan perhutanan sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan”. Jika pada akhir generasi kedua PS dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) inisiatif pengajuan dan fasilitasi berada pada tangan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhut, maka pada generasi ketiga banyak usulan PS berasal dari kelompok masyarakat sendiri. Capaian akses kelola PS sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat seluas 4.048.376,81 ha

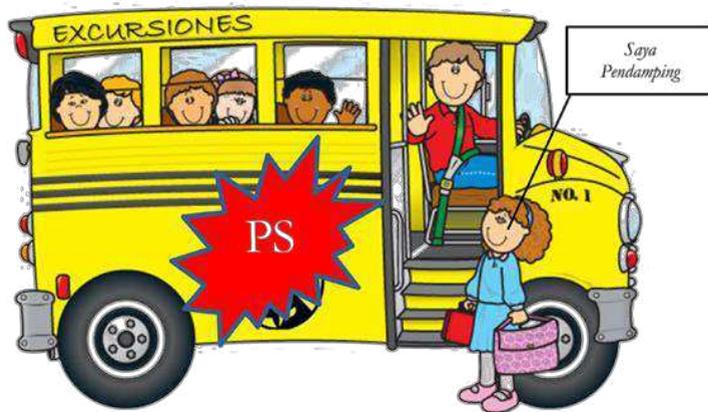
dengan 6.411 unit surat keputusan (SK). Ini melonjak dari capaian selama generasi kedua PS hingga tahun 2015, yaitu seluas 552.051 Ha.²

3.2. SK PS Memberi Kepastian, Manfaat harus Diusahakan

Untuk menjawab pertanyaan apakah yang terjadi setelah kelompok masyarakat mendapat SK legalitas pengelolaan hutan, dapat dipelajari dari beragam hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian Santika et al. (2019) menyebutkan seperti berikut: “kami meneliti 41 kawasan hutan yang sudah memiliki izin Hutan Desa di berbagai lokasi di Kalimantan. Kawasan hutan ini adalah bagian dari 1,4 juta hektar hutan serta lahan kritis yang mendapatkan status sebagai Hutan Desa. Hasilnya, lebih dari setengah, atau 51% dari 41 Hutan Desa tersebut mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan laju deforestasi. Namun, 14% tidak mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan laju deforestasi. 17% dari kasus yang diteliti mengalami *trade-off*; 13% menurunkan laju kemiskinan dengan mengorbankan hutan, 4% mampu menahan laju deforestasi tetapi tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan”. Berdasarkan catatan penulis tentang kinerja berbagai unit PS di Indonesia, terdapat 4 (empat) kemungkinan yang terjadi, yaitu: 1. terus bergerak; 2. bergerak beberapa langkah kemudian berhenti; 3. tidak bergerak maju karena bingung; 4. bergerak namun tersesat karena keluar dari jalur jalan.

² Lihat Lampiran untuk Peraturan dan Surat Keputusan Pemerintah sesuai dengan periode perkembangan PS menurut Fisher et.al (2019)

SK PS hanya memberi rasa aman dan percaya diri bahwa jalan yang akan ditempuh adalah benar dan lurus. Untuk bergerak lebih jauh, dibutuhkan kendaraan atau kaki yang kokoh jika harus berjalan. Kendaraan adalah modal atau aset. SK PS dan kendaraan seperti sisi koin uang, berbeda bentuk dan tempat tetapi harus selalu menyatu dan ada, agar pengakuan hak dapat menjadi manfaat yang nyata.



Gambar 2: Ilustrasi PS: SK Ibarat SIM; hasil usaha/manfaat adalah bus; pengurus kelompok merupakan pengemudi; anggota menjadi penumpang

3.3. Pendampingan, Pemberdayaan dan Inovasi

Kembali pada pengandaian PS sebagai kendaraan. Untuk kelancaran sebuah rencana perjalanan PS, kita memerlukan jasa orang yang serba bisa. Orang tersebut dapat berperan sebagai agen perjalanan, sebagai kondektur, sebagai navigator, dan sebagai teknisi. Orang tersebut adalah **pendamping**.

Dia merupakan seorang fasilitator. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi.

Fasilitasi adalah proses sadar dan sepenuh hati membantu kelompok mencapai tujuannya/ mencipta pilihan-pilihan terbaik dengan cara taat pada nilai-nilai dasar partisipasi agar kelompok benar-benar berfungsi sebagai kelompok. Orang yang melakukan fasilitasi disebut fasilitator atau pendamping. Menurut Rölling yang disampaikan oleh Groot dan Maarleveld (2000), fasilitasi/ pendampingan secara ideal seharusnya dapat mengubah arena perjuangan individu-individu menjadi sebuah forum pembelajaran sosial aktif menuju aksi yang efektif.

Fasilitator harus punya keinginan dan cita-cita bahwa suatu saat peran yang ia mainkan diambilalih oleh pengemudi dan penumpang, dalam kata lain warga dampingan. Sehingga, semua pekerjaan fasilitasi harus melibatkan warga dampingan. Proses alih daya (kuasa, kemampuan, pengetahuan, dan jaringan) dari pendamping/ fasilitator kepada warga dampingan atau kelompok masyarakat inilah yang disebut **pemberdayaan** (*empowerment*) (Barsimantov 2010).

Penulis akan menyampaikan dalam buku ini tentang sebuah metode atau lebih tepat disebut pendekatan yang dapat digunakan oleh pendamping/ fasilitator PS. Karena pendamping memerankan banyak hal pada saat pendampingan, maka pendekatan ini berperan sebagai prinsip-prinsip umum untuk memahami, bukan sebuah teknik baku sebagaimana metode.

Pendamping akan berhadapan dengan konteks PS yang sangat beragam, baik berbeda karena lokasi (eko-region), ciri masyarakat dampingan, maupun karena dinamika waktu. Jenis fasilitasi yang paling diinginkan masyarakat saat ini misalnya adalah kewirausahaan. Ini berbeda dengan hasil temuan sebelumnya

yang menyebut penguatan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan. Karenanya, perlu sebuah pendekatan, lebih dari sekadar cara-cara, untuk memahami beragam konteks PS.

Faktor lain yang dibutuhkan PS selain pendampingan adalah inovasi. Melalui inovasi maka PS akan adaptif dengan perubahan. Pendampingan tanpa membawa inovasi menimbulkan ketidakpercayaan diri pada pendamping dan kejenuhan pada masyarakat dampingan.

4. AGILE K3 TRANS SC2: BEKAL PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SDA

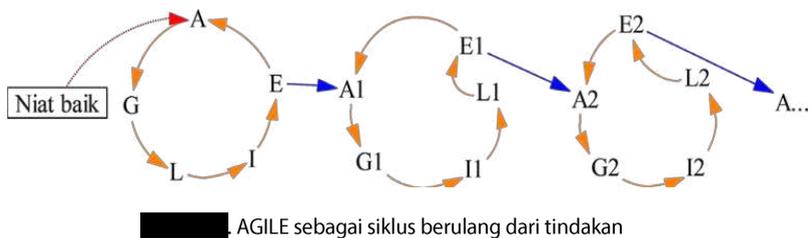
Bab 4 akan menguraikan tentang kristalisasi gagasan dan pengalaman empiris bagaimana pendampingan PS dikerjakan. Sedangkan tiga kasus Perhutanan Sosial (PS) yang disajikan Bab 5 sampai dengan 7 merupakan ilustrasi pendampingan awal PS pada tiga lokasi yang berbeda.

4.1. AGILE Suatu Pendekatan Pendampingan

Unit PS dalam skema apapun memiliki keragaman potensi, masalah, dukungan situasi sekitar, dan ancaman yang mengganggu dan merusak. Pertanyaan umum bila berhadapan dengan suatu unit PS adalah: 1. Apakah yang harus dilakukan? 2. Apakah tahapan kegiatan sebagaimana diatur dalam Panduan Umum Pendampingan PS dapat langsung diterapkan? Mengapa dalam cara yang sama suatu unit dapat bergerak maju, unit yang lain jalan di tempat, unit yang lain lagi malah mengalami kemunduran? Bagaimana memulai? Sekali lagi, apakah yang harus dilakukan?

Untuk keperluan fasilitasi pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, penulis mengembangkan AGILE, sebagai tahapan utama kegiatan.³

AGILE merupakan singkatan atau jembatan keledai untuk siklus berulang tahapan kegiatan - **A**mati, **G**ali, **I**ntimkan, **L**akukan, dan **E**valuasi. AGILE tidak linier tetapi berbentuk melingkar lurus, kemudian melingkar lagi, demikian seterusnya. Melingkar berarti fokus pada satu masalah, lurus berarti beralih ke masalah selanjutnya. Sebagai sebuah metode dan pendekatan, AGILE adalah kumpulan tindakan berulang yang tidak kaku. Pendekatan ini dapat dipakai dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, tidak selalu dalam fokus menyelesaikan masalah tertentu.



AGILE - adalah tindakan-tindakan untuk memahami, untuk belajar bersama.

AGILE - adalah moda untuk bergerak, melakukan perubahan.

AGILE - dalam konteks fasilitasi PS, adalah senjata utama pendamping, amunisinya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai komunitas dampungannya.

³ Sebuah sistem tidak akan dipahami tanpa kita mencoba untuk mengubahnya (lihat Lewin 1946). Pengaruh lain adalah metode etnografi kontekstualisasi progresif dari Vayda (lihat Vayda 1983)

Amati dan **Gali** merupakan tahap awal kegiatan pendamping dengan tujuan utama pemahaman konteks lokal. Tahap **Amati** dicirikan oleh pertanyaan seperti “Apa”, “Siapa”, “Dimana”, “Kapan”. Sedangkan Tahap **Gali** dicirikan oleh pertanyaan lanjutan, “Bagaimana” dan “Mengapa”. Terutama pada tahap Gali, partisipasi dari warga dapat mulai didorong sebagai awal belajar bersama. Tahap **Intimkan** adalah proses belajar bersama dari warga di fasilitasi pendamping, mengenai apa yang mungkin dilakukan oleh warga di dalam kondisi yang ada, dan membuat perencanaan aksi. Karena itu tahap ini dicirikan oleh pertanyaan “Mengapa tidak...” dan “Bagaimana jika”.

Sedangkan tahap **Lakukan** adalah upaya bersama warga dan pendamping melaksanakan perencanaan aksi, apakah itu mengembangkan komoditas tertentu, atau membuat demplot. karena itu dicirikan oleh pertanyaan seperti “Kapan”, “Dimana”, “Siapa”, “Apa” dari perencanaan aksi. Sedangkan **Evaluasi** adalah mempertanyakan apa yang sudah dihasilkan, dengan pertanyaan “Bagaimana hasilnya” dan “Mengapa demikian”. Evaluasi bukan dari pihak luar, namun bersama oleh warga dan pendamping. Sebagai analisa hasil kegiatan, namun juga sebagai ajang belajar-bersama. Tindakan selanjutnya adalah kembali kepada tahap **Amati** untuk masalah yang sama atau beralih kepada masalah lainnya. (lihat Gambar 3)

4.2. K3 – Komoditi, Kontrol dan Kultur

Apakah yang menjadi objek dari pengamatan, penggalian informasi dan kegiatan AGILE? Menurut penulis⁴ penentu keberhasilan PS adalah 1 (satu) paket objek yang terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu komoditas, kontrol, dan kultur (K3). Mengapa K3? Selama ini, sejak tahun 1970-an sampai sekarang, yang paling banyak dan sering dibahas dan didiskusikan orang-orang terkait PS adalah tentang komoditas yang ingin dikembangkan; terkait kontrol atas sumberdaya, alat, pasar, cara untuk mencapai tujuan; dan kebudayaan seperti halnya orientasi nilai-nilai di dalam komunitas, yang menentukan misalnya ada tidaknya kebiasaan gotong-royong di dalam komunitas.

1. **Komoditas** - merujuk kepada apa saja yang bernilai, barang dan jasa; tentang aneka usaha yang menghasilkan uang tunai atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pertimbangan mengenai Komoditas yang potensial dikembangkan didasari oleh kesesuaian ekologis, harga jual dan potensi pasar, teknologi yang dikuasai, biaya berbanding manfaat, siapa yang diuntungkan, dan hal-hal terkait tekno-ekonomi lainnya. Komoditas dapat dilihat dari unit yang sederhana, yaitu pekarangan dan kebun-kebun milik rumah tangga, kemudian ke ragam nafkah yang lebih luas, menuju ke unit yang lebih kompleks namun saling terkait yakni lanskap.

⁴ Merupakan rangkuman dari prinsip-prinsip desain kelembagaan *the commons* yang bertahan lama yang dirancang Ostrom (1990), prinsip-prinsip pengelolaan lanskap dari Sayer et al. (2013), kunci-kunci persyaratan keberhasilan PS dari Gilmour (2016), persyaratan keberhasilan PS yang disusun oleh RECOFTC (2013), dan prinsip-prinsip yang mewujudkan kelestarian pengelolaan hutan oleh masyarakat tani (Martin, 2016).

2. **Kontrol** – di dalam kenyataan, pengembangan komoditas sering terkendala dan tidak lestari. Salah satu penyebab yang penting adalah masalah ketidak pastian, terutama di dalam hal hak akses pada tanah, dalam kata lain masalah *tenurial*. Namun juga masalah kepastian pasar, penentuan harga, memastikan adanya tenaga-kerja, atau sistem kerja-sama antara warga yang dapat diandalkan. Kontrol⁵ dalam K3 ini adalah seperangkat aturan informal dan formal yang mengatur hubungan antara orang dengan orang, orang dengan pemerintah, orang dengan lembaga, dan orang dengan benda, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Kontrol adalah perihal kepastian dalam berusaha, tidak hanya untuk hari ini tetapi untuk masa depan, sehingga individu/ kelompok bersedia mengeluarkan biaya dan mengalokasikan waktu. kontrol adalah segala sesuatu yang mendasari apa yang disebut orang-orang sebagai legalitas, yaitu sah menurut hukum negara dan legitimasi, berarti dibenarkan dan diterima menurut perspektif orang banyak (sosial).
3. **Kultur** – ternyata adanya komoditas potensial untuk dikembangkan serta kontrol yang menjamin, tidak menjanjikan usaha berkembang. Karena adanya faktor penentu lain, yaitu faktor sosiokultural seperti pola hubungan sosial antar individu, antar kelompok, antar kelas, antar sektor, antara kota dan desa. Kultur juga dapat dipantau dari mentalitas penduduk, adat istiadat, kepercayaan, pandangan hidup, etos kerja, dan sebagainya. Karena budaya kita masih kental dengan ‘feodalisme’, maka dibanyak kasus memahami

⁵ Penulis gunakan kontrol untuk menggantikan konsep lain yang memiliki maksud dalam rentang yang sama, yaitu tata kelola (*governance*) dan kelembagaan (*institution*).

kultur setempat dapat dimulai dengan memahami sosok Pemimpin setempat, formal maupun informal. Aspek sosio-kultural ini ikut menentukan apakah warga mudah bekerja sama, apakah ada konflik terpendam (laten) antar kelompok warga, posisi dan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan.

K3	PENJABARAN	RAGAM ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN
KOMODITI	tentang aneka usaha yang menghasilkan uang tunai atau memenuhi kebutuhan rumah tangga	Kesesuaian ekosistem, akses terhadap pasar; teknologi yg ada; siapa diuntungkan?
KONTROL	Berkaitan dengan kepastian akses, aturan formal/ informal antar orang dan antar orang dan benda/ sumberdaya: perihal tanah, hasil hutan, harga pasar, tenaga kerja	Tanah siapa; kepastian akses pada sumberdaya dan kerja dan hasil; kesiapan tenaga-kerja; penentu- harga; modal-sosial lokal
KULTUR	pola hubungan sosial antar-individu/ -kelas / -kelompok; adat istiadat, kepercayaan, pandangan hidup, etos kerja	Homogenitas-/ pluralitas-sosial komunitas (komposisi etnik, agama, asal); umur dusun/ desa; perbedaan ekonomi/ kaya-miskin; posisi dan peran perempuan

Tabel 2: K3 dan Aspek Berkaitan Yang Harus Diperhatikan

Sentral dari aktivitas AGILE adalah **Intimkan**, yaitu kegiatan belajar bersama bahwa K3 bersifat sistemik. Artinya, komoditi, kontrol dan kultur adalah elemen-elemen yang saling terakait. Karenanya, jika para pihak menginginkan perubahan pada elemen Komoditas, maka elemen Kontrol juga harus mengikuti, dan perlu didukung perubahan tertentu dalam elemen Kultur. Kesadaran bersama perihal sifat sistemik K3 ini disebut sebagai Transformatif-Sistemik (Trans S).

AGILE	PERAN DAN TUJUAN	OBYEK KEGIATAN DARI TAHAPAN AGILE		
AMATI	Usaha pemahaman kondisi lokal: <i>"Apa", "Siapa", "Dimana", "Kapan"</i> . Membangun <i>trust</i> dng masy. lokal	KOMODITI	KONTROL	KULTUR
GALI	Kelanjutan dari Amati, pemahaman lebih dalam: <i>"Bagaimana"</i> dan <i>"Mengapa"</i> . Membangun <i>trust</i>			
INTIMKAN	bersifat mengajak, belajar-bersama dan melakukan perencanaan aksi, membangun modal-sosial, dengan pedoman pertanyaan: <i>"Mengapa tidak..."</i> dan <i>"Bagaimana jika"</i>			
LAKUKAN	tahap melaksanakan apa yang telah di rencanakan, dipedomani pertanyaan: <i>"Kapan", "Dimana", "Siapa", "Apa"</i> dari perencanaan aksi			
EVALUASI	<i>"Bagaimana hasilnya"</i> dan <i>"Mengapa demikian"</i> .			

Tabel 3. AGILE, Peran, Tujuan dan Obyek kegiatan

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan/ menawarkan transformasi atau perubahan dari satu keadaan (*state*) ke keadaan lain yang lebih diinginkan bersama?

Pendukung K3: Inovasi, Teknologi dan Modal Sosial

Transformasi Komoditas, seperti halnya pengembangan komoditas baru – mengandung perubahan teknologi dan ekonomi – dapat lebih cepat, jika didorong oleh inovasi di dalam aspek ilmu-pengetahuan, teknologi dan informasi (IPTEKI) yang dilakukan secara aktif oleh warga setempat, pendamping atau ahli yang diundang.

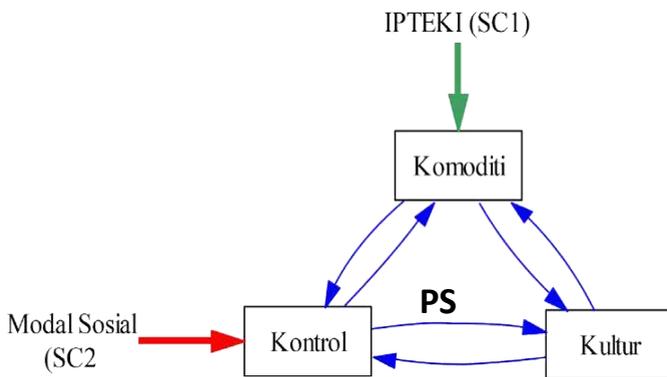
...“Inovasi adalah suatu proses pembaruan dan penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi menghasilkan produk-produk baru. Dengan demikian inovasi itu mengenai pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi”...(Koentjaraningrat, 2009: 210)

Apakah inovasi IPTEKI saja cukup untuk mengubah keadaan - mengembangkan Komoditas baru - secara konsisten? Seringkali tidak, karena untuk itu membutuhkan perubahan pada aspek **Kontrol** dan **Kultur**. Bagaimana menggulirkan perubahan pada aspek Kontrol dan Kultur?

Pelajaran dari beragam tempat di dunia menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang berhasil mengelola sumber daya hutan secara lestari memiliki karakteristik tertentu yang kurang dimiliki oleh kelompok yang gagal, yaitu **modal sosial**. Modal sosial adalah perekat yang menegakkan kebersamaan dalam masyarakat yang tanpanya tidak akan ada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Kualitas apa saja yang disebut **Modal**

Sosial?. Pilar utama modal sosial adalah **kepercayaan (trust)**, **norma**, dan **jaringan sosial**, yang mendukung kerjasama dan kegiatan produktif bersama.⁶ Dengan modal kebersamaan yang tinggi maka **Kontrol** (hak, kewajiban, dan sanksi) terhadap sungai, hutan, danau (sumberdaya-bersama/*common pool resources*) oleh suatu masyarakat dapat diciptakan dan ditegakkan serta kondisi *open access* dapat dicegah.

Aspek **Kultur** dari K3 adalah yang paling sulit, dan memakan waktu lama untuk berubah atau dirubah. Karena ciri tersebut maka disini dianggap *given*. Diharapkan sesuai dengan ciri sistemik K3, perubahan pada aspek Komoditi (teknologi, ekonomi dan iformasi) dan Kontrol (modal sosial) akan ikut merubah Kultur kearah yang diharapkan.

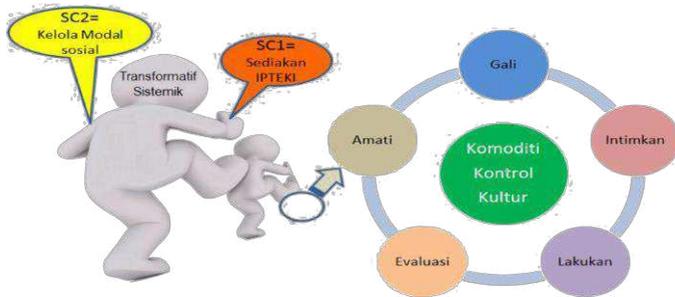


Gambar 4 Saling keterkaitan antar elemen objek pengelolaan SDA

kelola modal sosial (*Social Capital-SC*) merupakan **bekal utama** yang mampu dibawa oleh pendamping/ penggerak PS. Bila semua elemen penting di dalam pendekatan pendampingan yang telah dibahas dimuka disatukan, maka akan di dapat: AGILE K3 Trans

⁶ Mengacu pada Coleman (1988), Putnam (1993), Fukuyama (1995)

SC² ☞ lakukan secara berulang proses Amati Gali Intimkan Lakukan Evaluasi terhadap tiga elemen yang menjadi satu, yaitu Komoditas, Kontrol, dan Kultur dengan sikap Transformatif dan Sistemik berbekal SC1 IPTEKI dan SC2 modal sosial.



Gambar 5. Ilustrasi Pendamping PS dengan Kerangka Kerja AGILE K3 TransS SC²

AGILE K3 Trans SC² adalah kerangka kerja, sebuah pendekatan untuk mendampingi dan menggerakkan unit sumber daya alam yang dikelola masyarakat, dalam hal ini Perhutanan Sosial (PS). Kerangka kerja ini idealnya digunakan berurutan, dari saat fasilitasi pengajuan PS, penyusunan RKU dan RKT, pelaksanaan kerja tahunan/ usaha-usaha, dan evaluasi.

5. BHL MUARA MEDAK: BERJUANG MENGELOLA PROBLEMATIKA LAHAN GAMBUT

5.1. Mencermati Lanskap: Kompleksitas Kehidupan Lahan Gambut

Hutan Gambut, Kawasan Hutan Negara dan Dusun 7:

Desa Muara Medak (MM), Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terdiri dari 10 dusun. Dusun yang dibahas disini adalah Dusun 7. Dusun 7 ini cuma dusun kecil, dengan jumlah kepala keluarganya 100-an KK, dan tidak semua tinggal menetap di dusun. Sebagian besar warga Dusun 7 adalah pendatang keturunan Jawa dan sisa dominan lainnya adalah warga asli, Suku Anak Dalam (SAD) sekitar 34 KK yang telah menetap di sini sejak nenek moyang mereka.

Daya tarik Muara Medak bagi pendatang adalah pekerjaan menggesek kayu. Salah satu warga pendatang awal – Mbah Miran – datang ke Dusun 7 tahun 2002, karena tertarik dengan pekerjaan menggesek dan menjual kayu. Sebagian lagi dari warga Dusun, termasuk yang kini menjabat perangkat Dusun 7, tiba dari daerah asal mereka di Jambi tahun 2012 atas iming-iming yang sama. Kebanyakan warga pendatang ini tidak sadar bahwa mereka akan bekerja di hutan gambut yang merupakan Kawasan Hutan Negara. Baru kemudian ketika di dalam kegiatan penebangan dan mengolah kayu, sering kali disuruh

menyembunyikan diri karena ada penyidikan aparat, timbul kesadaran tersebut. Namun ketika itu tidak ada jalan lain kecuali menyatukan diri dengan kondisi yang ada, bahkan pendatang generasi pertama menjadi pelaku aktif di dalam menjual tanah gambut yang sudah tidak berhutan pada pendatang baru yang masih polos dan datang untuk mencari tanah pertanian.

Perubahan Lanskap dan Sistem Penghidupan:

Menurut penuturan warga SAD, pada awalnya di atas tanah gambut merupakan hutan rimba, yang kemudian dikuasai dan di ekstraksi kayunya oleh sebuah HPH. Setelah tegakan kayu hutan gambut menipis, lahan luas tersebut sebagian dikuasai dan dikelola sebagai HTI (Hutan Tanaman Industri) untuk tanaman akasia. Pohon-pohon di hutan gambut yang masih tersisa kemudian menjadi obyek *illegal-logging*. Kanal-kanal di lahan gambut itu dibuat dengan alat-alat besar untuk mengeluarkan kayu, hal mana melukiskan besarnya skala *illegal-logging* yang ketika itu berlanjut.

Perubahan lanskap diatas mempunyai dampak besar pada kehidupan warga Suku Anak Dalam. Sistem penghidupan mereka merupakan kombinasi kompleks dari menangkap ikan rawa gambut (*bekarang*) seperti lele, gabus, tomang dan tembakang dengan menggunakan bubu, memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu dan juga mengambil kayu. Dengan hilangnya hutan maka warga Suku Anak Dalam kehilangan sumber penghidupan mereka. Bahkan mata pencarian *bekarang*-pun hasilnya terus bertambah sedikit karena hutan rawa gambut tempat ikan memijah boleh dikatakan sudah punah.



Gambar 6. Rumah lama SAD dengan jaring ikan

Illegal logging dan pengkaplingan tanah:

Kegiatan *illegal logging* dan pembukaan kanal berjalan bersamaan dengan pengkaplingan dan kegiatan jual-beli tanah ex hutan gambut. Jual lahan dilakukan terutama pada musim kemarau, saat air yang biasanya menggenangi lahan gambut terlihat surut, sehingga pembeli terkecoh kondisi tanah dan lingkungan yang sebenarnya. Selain itu pembeli juga tidak sadar bahwa tanah yang mereka beli berada di Kawasan Hutan Negara. Petani pendatang mendapatkan tanah melalui transaksi seperti ini. Namun adalah orang-orang dari luar, bahkan dari kota Jambi, yang menjadi pembeli dan penguasa tanah absenti paling luas di Kawasan Hutan Negara ini. Menurut warga lokal, ada yang mencapai 100 hektar. Kondisi yang dihadapi oleh warga pendatang Dusun 7 diwakili oleh pernyataan seorang warga:

■ *Kalau begitu, kami ini datang ke tempat salah ya Pak, lahan tidak bisa diolah, kawasan hutan pula. Tetapi gimana lagi, kami datang ke sini ini ingin mengubah nasib, ingin hidup lebih baik*”, begitu ucap pak Asep warga Dusun 7 hari itu.

Mengapa penduduk terus menanam sawit?:

Parit Gito adalah kanal buatan yang terdekat dengan Dusun 7. Kanan-kiri kanal ditanami kelapa sawit. Sebagian besar lahan di hilir parit digenangi air pada musim hujan. “Ini kebun yang kita injak sekarang sudah 3 (tiga) kali ditanami kelapa sawit, tetapi

sekarang tidak berbekas, gagal tumbuh karena kebakaran....” Pertanyaannya, mengapa sawit terus ditanam? Jawaban penduduk sederhana. Adakah tanaman lain selain kelapa sawit yang mampu memberikan penghasilan kepada petani tiap 2 (dua) minggu secara terus menerus? Adakah tanaman lain yang mampu tumbuh di lahan gambut, yang kadang tergenang kadang kering sekali, seperti kelapa sawit? Adakah tanaman lain di lahan gambut yang karenanya seorang bapak bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, bisa buat rumah beton, bisa beli kendaraan?” Selain alasan diatas, bagi warga pendatang, sudah kepalang terkecoh membeli tanah rawa gambut maka mengikuti pola pertanian yang sudah ada merupakan jalan paling mungkin.

Kompleksitas permasalahan di Dusun 7, Muara Medak, yang keseluruhannya terletak di Kawasan Hutan Negara disimpulkan oleh dialog antara pejabat Dusun Pak John dengan peninjau dari luar:

“Kelapa sawit mendominasi seluruh areal di sekitar Dusun 7. Pemilik kebunnya adalah petani biasa, pejabat, hingga pengusaha. Areal di sebelah kiri Parit Gito yang 2015 terbakar pun kembali ditanami kelapa sawit oleh penguasa lahannya. Ada beberapa pabrik kelapa sawit di wilayah Provinsi Jambi, tidak jauh dari Dusun 7. Bahkan Pak John pun memiliki akses untuk bisa menjual langsung ke pabrik. Jadi, Pak John benar”, jawab Pak A tanpa menjawab secara langsung pertanyaan Pak John. “Tetapi masalahnya, kelapa sawit tidak/belum diperkenankan dalam PS Pak. Dulu dituduh sebagai komplotan pembalok liar, kemudian disalahkan sebagai penjual lahan illegal, apakah Pak John dan kawan-kawan mau tetap berkonflik dengan kehutanan”, sambung Pak B yang malah balik bertanya.

Perhutanan Sosial (PS):

Calon areal kerja PS, luasnya sekira 3.500 ha, tidak terletak di sekitar dusun yang sawitnya sudah panen dan bukan tanah

mineral.⁷ Namun seluruh areal kerja Perhutanan Sosial (PS) adalah tanah gambut, bahkan yang selama ini sering terbakar. Areal kerja PS dari Sungai Pejudian sampai batas wilayah PT Rimba Hutan Mas (RHM), merupakan hamparan belukar yang didominasi pakis dan dimusim hujan tergenang air. Mendahului sub-bab berikut, beberapa fakta dan pernyataan warga memberikan sekelumit gambaran mengenai pelaksanaan program PS di Muara Medang.

Pertama, kenyataan mengenai kualitas areal PS di atas dapat membangkitkan pertanyaan mengenai tujuan dari program PS. Kedua, beberapa pernyataan warga menyibak sekelumit permasalahan yang dihadapi pelaksanaan program PS.

“Apakah penduduk paham mengenai areal PS?” – jawaban para informan adalah, tidak. Pejabat dusun menimpali: “Kami ikut saja arahan KPH” .

“...dua kali pertemuan PS, yang hadir kebanyakan orang dari luar dusun, padahal yang dibahas lahan di sekitar dusun”.

“Saya bingung, yang datang ke pertemuan justru orang-orang lain lagi. Malah katanya PS itu mau bagi-bagi lahan, jadi banyak orang yang mau daftar dan ikutan”,

“.....lahan gambut itu (areal PS) kan sebagian besar milik orang luar, dulu kan sudah dijualbelikan kepada banyak orang...”

“Yang kita patut waspadai, lahan-lahan itu diserahkan kepada Bu Lia, dia orang berduit”.

Pernyataan-pernyataan tersebut mengandaikan tumpang-tindihnya klaim atas kawasan hutan dan terutama yang diprogramkan sebagai PS. Serta posisi yang lemah dan kecurigaan dari warga Dusun 7 terhadap pihak-pihak kuat diluar, baik pihak-

⁷ Sebagian besar kawasan hutan bertanah mineral sudah berada dibawah penguasaan pemilik besar absenti dari Jambi. Sebagian kecil oleh warga Dusun 7.

pihak yang menguasai tanah kehutanan skala besar maupun pihak instansi Kehutanan.



Gambar 7. Kanal melintasi rawa gambut, *ex illegal logging*, kini menghubungkan kebun sawit, kawasan perhutsos dan kampung SAD

Posisi dan Peran dari Pendamping:

Pada tahap ini – mencermati lanskap - pendamping memposisikan diri sebagai pengamat dan penggali informasi. Tugasnya adalah memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat, hubungannya satu dengan lain serta dengan sumberdaya-alam yang berupa Kawasan Hutan Negara.

Karena peran dan posisi tersebut, maka pada awal tahap ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pendamping lebih bercorak: ‘apa’, ‘ini punya siapa’, ‘oleh siapa’, ‘dimana’, ‘dibangun kapan’.

Berikutnya pada tahap ini pertanyaan bercorak: ‘bagaimana’ (bagaimana membangun kanal ini, bagaimana menanam sawit di rawa gambut, dsb.).

Kemudian baru beralih pada pertanyaan bercorak: ‘mengapa’.

Dengan mengambil sikap tersebut, pendamping memperlihatkan ketertarikannya pada ‘penyampaian orang lokal’, ‘permasalahan dari sudut pandang lokal’, tanpa memberikan penilaian atau mengumbar pandangannya. Selain memang pendamping memerlukan informasi lokal, sikap ini memperlihatkan penghargaannya pada warga lokal yang menjadi dampingannya. Dengan demikian membangun saling kepercayaan. Hasilnya tercermin di dalam sikap warga lokal yang menjadi sumber informasi: *Warga mulai suka, karena para pendamping hanya bertanya, tidak pernah mengatakan jawabannya salah atau apa yang mereka lakukan salah, seperti yang selama ini sering dialamatkan kepada mereka.*

5.2. Transformasi Lanskap: Kelahiran Regu Peduli Air (REPAIR) Gambut.

Terdapat tiga permasalahan yang dihadapi oleh program Perhutanan Sosial (PS), yang dengan singkat dibahas disini, sebelum lebih lanjut membahas kegiatan pendampingan dan warga merespons turunnya SK PS dan perjuangan warga mengelola areal kerja PS.

Masalah pertama, adalah tumpang tindih klaim tanah Kehutanan:

“Sebenarnya kalau masalah lahan yang sulit diolah, kami bisa belajar sendiri. Itu di Jambi lahan-lahan gambut diolah masyarakat seperti kami juga. Yang berat bagi kami adalah berhadapan dengan orang-orang. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tahu semua lahan itu sudah ada yang punya. Tetapi kalau kehutanan datang, mereka bilang semua lahan milik negara, tidak ada milik siapa-siapa. Kami mirip semut di tengah pertarungan gajah. Bisa mati kami Pak”

Begitu salah satu pernyataan warga, yang mencerminkan masalah pertama yang dihadapi program PS di Muara Medak.

Yaitu tumpang tindih klaim antara “pemilik-pemilik” besar absenti dengan areal kerja PS yang diperuntukan bagi warga dusun-dusun yang terletak disekitarnya. Ketika ditawarkan oleh pihak Kehutanan untuk menyelesaikannya dipengadilan – sadar akan posisi nyata mereka yang lemah serta ketidak yakinan dukungan dari pihak Kehutanan dikelak hari - warga menolak berkonfrontasi dan mengusulkan agar diselesaikan secara damai diluar pengadilan. Seperti ternyata dari jawaban warga atas tawaran pihak Kehutanan diatas: “Janganlah Bu, kalau bisa kita pakai jalan damai saja, bagaimana caranya tidak ada yang dirugikan. Masalahnya kalau masuk musim kemarau, lahan gambut itu mudah sekali dibakar orang, kalau ada yang tidak senang,

Masalah kedua, adalah dilema luasan tanah dan kemampuan mengendalikan kebakaran: Terdapat pertentangan antara luas kebutuhan tanah di kawasan gambut yang diperlukan warga untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan kemampuan mengelola ancaman kebakaran lahan. Pak Jay selaku pimpinan desa menyampaikan sesuatu yang disebutnya aspirasi warga.

“Begini Bapak Ibu ya, maaf ini, menurut saya dan warga kami yang berpengalaman hidup di gambut ini, lahan 2 (dua) hektar itu tidak cukup untuk bisa berusaha tani, minimal 6 (enam) hektare Pak untuk bisa kelihatan hasilnya. Saya dengar PS ini membatasi lahan hanya dua hektare untuk setiap keluarga. Kurang itu Pak”, kata Pak Jay sedikit meninggi di awal pengucapan. Pak A dari litbang kemudian bertanya, “Satu keluarga sanggup ya Pak mengolah lahan seluas enam ha dan menjaganya dari ancaman api?”

Keduanya benar dan disana ada dilemma besar yang harus dihadapi oleh warga, yang disatu pihak tidak memiliki posisi tawar sebagai penggarap illegal tanah kehutanan dan dipihak lain ketidak sanggupannya menanggulangi kebakaran tanah gambut.

Masalah ketiga, adalah biaya tinggi mengelola tanah gambut: masalah ini diperdalam oleh perbandingan antara biaya modal dan tenaga kerja yang sangat tinggi untuk mempersiapkan lahan gambut, dengan hasil yang diperoleh dari tanah gambut di dalam program PS yang dibatasi 2 hektar per KK. Permasalahan ini tersirat dengan jelas di dalam pengalaman warga membuka lahan demplot, yang diuraikan di Kotak 1.

Ketiga permasalahan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan program PS yang sudah dicanangkan, beserta dengan pembagian SK KULIN KK langsung oleh Presiden Joko Widodo di Palembang, kepada kelompok tani. Status legal ini memungkinkan warga mengambil langkah nyata di dalam rangka pengelolaan areal kerja PS.

Kegiatan pertama, adalah proses perencanaan area kerja PS:

Warga pendatang Dusun 7, serta dusun-dusun lainnya dari desa Muara Medak, tidak memiliki tradisi dan pengalaman bekerja sama, apalagi di dalam mengelola suatu hamparan seluas 3500 Ha. Karena itu inisiatif pendamping menjadi sangat penting. Di dalam pertemuan dari anggota KTH merespons undangan acara penyerahan SK PS oleh Presiden kepada KTH di Palembang, dipandang momen yang tepat oleh pendamping untuk mengajak warga untuk mengambil langkah lebih jauh, yaitu membuat perencanaan areal kerja PS.

“Bagaimana jika areal seluas 3.500 ha ini diatur dan direncanakan peruntukannya. Kita tata seperti membangun rumah, ada ruang tidur, ruang makan, dapur, ruang tamu, dan ada pekarangan. Penataannya sesuai potensi alamiah saja, gimana Pak?”

Demikian ajakan kepada warga oleh pendamping. Hasilnya adalah identifikasi 4 zona areal kerja PS: 1) Zona Perikanan Tangkap; 2) Zona *Agroforestry* terbatas (karena daerah gambut

dalam); 3) Zona Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan pembenihan; dan 4) Zona Silvopastoral.

Kegiatan kedua, adalah membuat Rencana Usaha Kerja (RUK) dan Aturan Kerja KTH:

Di dalam pertemuan antara KTH di Jambi, dihasilkan Rencana Kerja Usaha sebagai pemandu jalan bagi para KTH yang tidak pernah mempunyai pengalaman mengelola areal seluas 3500 ha. Selain itu dihasilkan aturan Kelompok dan aturan mengelola lahan.

Kegiatan ketiga, adalah membangun Demplot:

Untuk arena pelatihan dirancang suatu demplot Agroforestry 2 Ha, dengan kombinasi tanaman Pinang, Jelutung, serta tanaman bawah penghasil minyak atsiri seperti rumput vetiver. Kotak 1 menguraikan jerih payah warga mengembangkan demplot tersebut. Detail menarik adalah, tanah untuk demplot diperoleh melalui suatu pendekatan dari salah satu 'pemilik' besar absenti yang melihat langkah tersebut sebagai strategis untuk dapat diterima masuk menjadi anggota KTH.

Kotak 1.

Warga Dusun 7 menyiapkan dan mengerjakan persiapan lahan untuk menanam jelutung, pinang, dan beragam jenis tanaman bawah penghasil minyak atsiri. Gotong royong warga menyiapkan lahan butuh waktu tidak sebentar. Tumpukan kayu dan akar pohon bekas terbakar di lahan 2 (dua) hektar untuk demplot itu harus dibersihkan. “Ternyata memulai usaha tani dengan sebenar-benarnya di lahan gambut dalam bekas terbakar sangat berat, butuh tenaga dan biaya ya Pak Gino”, celutuk Pak Gino kepada Pak Jali yang sedang memotong akar-akar pohon. Sabtu, 25 April 2019 jam 4 pagi, Bu Siti, Bu Yudi, dan Mbak Yuli sudah sibuk menyiapkan masakan. Hari ini adalah penanaman bersama. Bibit jelutung, pinang, beberapa varietas baru serai wangi, akar wangi/vetiver, serai dapur, dan lada sudah siap. Sebulan sebelumnya, Bu Dwi, peneliti ahli minyak atsiri dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) telah memeriksa lahan demplot, bersama warga menyusun cara persiapan lahan dan menanam. Hari itu, semua warga tumpah ruah menuju demplot. Satu bulan setelah penanaman, musim kemarau mulai menjelang.

Meskipun air di kanal masih tinggi, tetapi suasana kering di permukaan tanah sangat terasa. Tanaman yang beranjak menghijau dan bermunculan daun-daun baru mulai menguning. “Sudah tiga hari tidak hujan Pak, gambutnya kering sekali, jika diremas berderai diterbangkan angin”, lapor Pak Hamzah yang bertugas menjaga demplot kepada Pak John di dusun. “Selama Juni-Juli ini kita harus menyiram demplot untuk menyelamatkan tanaman vetiver dari kekeringan ekstrem Pak” ungkap Pak John kepada Pak A, melalui pesan whatsapp (wa). Mereka berinisiatif menyirami lahan demplot dengan mesin penyedot air. Tentu, biaya dan tenaga penyiraman di luar perkiraan masyarakat. Akhir Juli 2019, kemarau tiba. Pak John yang beberapa bulan yang lalu diangkat menjadi pengurus Gapoktanhut, kembali menghubungi Pak A di Palembang. “Pak, gambut makin kering, air di dalam kanal makin turun, bagaimana Pak”, tanya Pak John gusar. “Kalau begitu, tahan air di dalam kanal sesegera mungkin agar tidak mengalir keluar lagi”, jawab Pak A. Dua hari kemudian, Pak John kembali menghubungi Pak A melalui WA, mengirimkan foto pengurus KTH yang sedang memasang sekat kanal dari terpal. “Air di sekitar demplot sudah tinggi kembali Pak. Bisa untuk cadangan menyiram tanaman.”

Sementara musim kering terus berlanjut, berdampak pada turunnya permukaan dan keringnya gambut sehingga ancaman kebakaran menjadi nyata. Tim Litbang Kehutanan dan ahli tata air dari Universitas Jambi datang meneliti kondisi lapangan. Sekat kanal yang telah dibangun pada masa sebelum perhutanan sosial kurang berfungsi secara efektif. Pelatihan tata air gambut dilaksanakan untuk anggota KTH, serta atas kesepakatan bersama dibentuk Regu Peduli Air (REPAIR).

“Kita harus memulai kerja sama antarwarga. Air di lahan gambut harus kita tata. Tidak bisa lagi hanya dengan kanal terbuka. Lahan bisa kering dan sangat kering. Itu berarti risiko kebakaran akan sangat tinggi”, demikian sebagian cuplikan pandangan Pak John mengutarakan pengalamannya dengan kebakaran gambut tahun 2015.

REPAIR bekerja bergotong royong memasang sekat kanal dari terpal, dibantu oleh beberapa perusahaan yang beroperasi disekitar kawasan tersebut. Selain itu REPAIR menjalankan patroli untuk mendeteksi dini terjadinya kebakaran. Peran REPAIR diuraikan dalam Kotak 2.



Gambar 8. Kegiatan REPAIR

Kotak 2

Rapat dan pelatihan tata air gambut ini akhirnya membuat kesepakatan untuk membentuk Regu Peduli Air (REPAIR) gambut. Tim ini akan segera bekerja memasang sekat kanal dari terpal. Beberapa pihak tetangga areal kerja PS bersedia membantu menyiapkan terpal, salah satunya adalah PT HBL. Selain memasang sekat, REPAIR mengaktifkan patroli situasi air. Patroli ini mereka anggap penting, karena kebakaran telah terjadi di Dusun 9. Patroli air diarahkan untuk menelusuri kanal-kanal yang tersebar di areal kerja PS. Dalam patroli, regu kecil akan berusaha membuat sekat-sekat tambahan, agar air tidak cepat hilang. Patroli juga berguna untuk mewaspadaai kemungkinan terjadinya titik api. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di lapangan dan mewaspadaai titik api yang dikabarkan muncul dari arah areal PT. RHM, api terlihat dari lahan tetangga mereka, PT HBL, 13 Agustus 2019. Fokus kerja menahan air teralihkan untuk membantu pemadaman api. Tidak seperti kebakaran 2015, kali ini api bergerak sangat cepat. 14 Agustus 2019, api menuju demplot. Anggota REPAIR terpancarnya untuk memadamkan api yang titiknya telah beranak-pinak. Api dengan asap pekatnya nan tebal membumbung dimana-mana. Mesin air dan selang penyiraman bekerja tiada henti. REPAIR berjuang memadamkan api. Tidak seperti lahan lain yang musnah dalam hitungan jam, areal demplot belum tersentuh api pada hari kedua kebakaran. Air yang melimpah di dalam sekat kanal membantu membasahi lahan dan bangunan balai pertemuan mereka. Nahas, setelah berjuang melawan api, kobaran api tak bisa dicegah masuk ke dalam demplot, di tengah malam, saat hari mulai masuk tanggal 15 Agustus 2019. Tim REPAIR yang dua hari dua malam melawan api, diminta mundur ke dusun oleh para pendamping. Perjuangan belum selesai. Meskipun api masih membumbung tinggi, pada hari kemerdekaan RI, 17 Agustus 2019, REPAIR memasang sekat terpal untuk menahan air pada kanal di sekitar permukiman SAD. Sekat inilah yang kemudian dinilai menyelamatkan areal tersebut dari api. REPAIR dibentuk oleh Gapoktanhut BHL dan KPH Lalan Mendis dengan tugas mengelola air gambut. Visinya adalah Gambut Basah Masyarakat Sejahtera, dan misinya adalah membangun, memelihara, dan mempertahankan sekat kanal, memastikan muka air tanah tetap tinggi, dan mengajak semua pihak bersatu menjaga air gambut. Latar belakang REPAIR adalah keyakinan bahwa gambut dan air harus bersatu, tidak terpisahkan. Menjaga kesatuan mereka adalah sumber kesejahteraan. Memisahkannya menjadi sumber bencana.”

Timeline pelaksanaan program PS dibawah ini memperlihatkan perspektif waktu dari kegiatan pendamping dan warga yang tergabung di Gapoktanhut BHL di dusun-dusun desa Muara Medak.

WAKTU	KETERANGAN
November 2018	Pertemuan KTH membahas undangan penyerahan SKPS oleh Presiden pada KTH.Merespons kepastian keluarnya SK PS, pendamping mengusulkan perencanaan areal kerja PS yang disetujui peserta.
Desember 2018	Pertemuan dari semua KTH mempersiapkan draft Rencana Kerja Usaha (RKU) areal kerja PS seluas 3500 ha. Di dalam RKU areal kerja PS dibagi ke dalam 4 zona. RKU disepakati sebagai pemandu jalan yang fleksibel, serta sebagai arena belajar bersama.
Januari 2019	Pendamping, pejabat dari Litbang Kehutanan dan KTH memastikan batas areal kerja PS.Menentukan areal Demplot seluas 2 Ha.
April 2019	Kegiatan mempersiapkan dan menanam areal Demplot: Pinang, Jelutung, beragam tanaman bawah untuk minyak atsiri.
Mei 2019	Kemarau tiba, permukaan air turun, gambut kering dan dengan demikian juga tanaman di Demplot.Mesin-mesin penyedot air dikerahkan untuk menyiram tanaman.
Juli (akhir) 2019	Puncak musim kemarau, air di kanal semakin rendah, gambut makin kering. Air harus ditahan untuk keperluan penyiraman tanaman, warga membangun sekat-sekat air.
Agustus 2019	Perahu sudah tidak dapat digunakan, digantikan motor. Kegiatan bersama harus diperkuat untuk membangun sekat-sekat penahan air, kini bukan untuk tanaman namun dalam rangka mencegah kebakaran gambut.REPAIR – Regu Peduli Air dibentuk untuk membuat sekat dan patroli memantau api kebakaran.
13 Agustus 2019	Kebakaran gambut pertama terjadi

14 Agustus 2019	Kebakaran mulai mengancam Demplot. Warga berjuang menahan api.
15 Agustus 2019	Pada malam hari api melalap Demplot. Sebelumnya warga sudah ditarik mundur dari Demplot.
17 Agustus	Sekat air yang dibangun warga masih dapat menyelamatkan pemukiman Suku Anak Dalam dari kebakaran.

Posisi dan Peran Pendamping:

Pada tahap Transformasi Lansekap ini, dari perspektif AGILE fokus pendampingan adalah pada Intimkan dan Lakukan. Di dalam perspektif AGILE, '**Intimkan**' adalah kegiatan yang berkaitan dengan Perencanaan Aksi. Sedangkan '**Lakukan**' adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari perencanaan.

Di dalam fase Transformasi Lansekap ini suatu momentum tercapai yaitu: Diperolehnya SK PS bagi KTH di Muara Medak, sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya. Fase ini sangat penting karena warga dampingan yang terdiri dari ragam pendatang dari berbagai daerah, hanya dipersatukan oleh keinginan membangun penghidupan lebih baik. Tidak ada modal sosial yang dapat diandalkan masyarakat pendatang ini untuk bekerja sama. Disini peranan dari pendamping menjadi sangat penting:

- Memobilisasi warga untuk pertemuan-pertemuan koordinatif,
- Mengambil inisiatif dan mendorong warga membuat perencanaan areal kerja PS dan Peraturan kerja bagi KTH, serta

- Mendampingi warga mempraktekkan apa yang telah direncanakan dan aturan kerja KTH melalui kerja pengelolaan tanah gambut di areal Demplot, sebagai kegiatan belajar bersama.

Proses menumbuhkan sikap saling-menghargai dan saling-percaya (*trust*) antara pendamping dan warga pada fase 'Mencermati Lanskap' merupakan pra-syarat bagi dimungkinkannya kegiatan-kegiatan bersama selanjutnya. Seperti pembentukan REPAIR serta perjuangan melawan kekeringan dan ancaman kebakaran Demplot.

5.3. Menjaga lanskap: Watak Air Adalah Berteman.

Pada fase ke tiga, Menjaga Lanskap, para pihak tiba kembali pada awal AGILE yaitu Amati dan Gali kembali dari informasi, pengalaman dan pengetahuan yang terakumulasi. Atas dasar pengetahuan ini warga dan pendamping dapat membangun kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat untuk merespons tantangan-tantangan berikutnya.

Secara umum, aksi pembangunan demplot agroforestry tahun 2019 memberikan banyak pelajaran. Meskipun demplot belum bisa menjadi teladan bagi usaha agorofoforestry bagi zona seluas kurang lebih 1.600 ha, muncul beberapa hikmah untuk memperbaiki langkah aksi selanjutnya. Karena sebagian besar areal didominasi semak belukar dan hamparan pakis, usaha tani menggunakan komoditas tanaman semusim, semi intensif hingga intensif, sangat rentan dirusak hama babi. Pada saat curah hujan tinggi, sebagian lahan berpeluang tergenang. Pada saat musim kemarau, ancaman kebakaran merusak semua yang telah diusahakan.

Lingkaran tidak berujung pangkal petani gambut:

Pangkal dari seluruh problematika mengolah lahan gambut adalah:

- biaya tinggi ☞ Untuk mengurangi biaya tinggi, petani mengurangi input produksi, termasuk perawatan dan penjagaan lahan.
- Akibatnya, lahan tidak terawat ☞ Namun untuk tujuan pertanian gambut dikeringkan, sehingga dimusim kering rawan kebakaran.
- Pada gilirannya, produktivitas tanaman per satuan lahan, sebagaimana dalam kasus kelapa sawit, menjadi lebih rendah dibanding di lahan mineral.
- Tambahan lagi, hasil produksi dari lahan seluas 2 (dua) hektar dinilai tidak akan mampu mengkompensasi biaya yang dikeluarkan.
- Kondisi ini membawa konsekwensi petani gurem sering terpaksa menjual tananya.
- Persaingan penguasaan tanah yang tidak terkontrol, oleh petani kecil pendatang dan pemodal besar dari kota (pemilik absenti), sama-sama menguasai tanah Kawasan Hutan Negara secara ilegal, berpotensi membawa konflik.
- Kemudian terdapat masalah sikap egois sesama petani dalam hamparan lahan gambut yang sama (satu lanskap).

Kebakaran lahan gambut adalah wujud fisik dari rantai-rantai masalah yang tak terlihat tersebut.

Kebakaran besar tahun 2019 di lanskap gambut Muara Medak, berlangsung selama 4 (empat) bulan, sejak pertengahan Agustus sampai akhir November. Aksi dan belajar bersama kelompok PS BHL sebelum, saat awal, hingga masa akhir api ketika memasuki

musim hujan, paling tidak memberikan 2 (dua) pelajaran berharga, yaitu:

1. Karakteristik kebakaran gambut jika sudah membesar atau dalam titik kecil namun berjumlah banyak dan tersebar, api di lahan gambut tidak pernah tertanggulangi;
2. Faktor penyebab munculnya titik api yang kemudian tidak tertanggulangi, atau pemahaman faktor pemungkin (*enabling condition*) kebakaran.

Dari lingkaran tidak berujung pangkal petani gambut diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor pemungkin/ penguat terjadinya kebakaran lahan gambut meliputi 3 (tiga) unsur tak terpisahkan, yaitu:

1. Gambut terdrainase membentuk suasana kering bahkan kering ekstrem;
2. Lahan tidak terawat seperti tanpa pemilik;
3. Suasana kompetisi di lahan gambut/ persaingan untuk menguasai lahan melalui jalur legal formal maupun informal.

Ketiga unsur tersebut, ketika ada api kecil, dimunculkan sengaja atau tidak sengaja (keteledoran), akan segera berubah menjadi kebakaran besar. Kecepatan gerakan api, berdasarkan pengalaman kejadian tahun 2019, jauh melebihi kecepatan mobilisasi manusia dan teknologinya yang terbatas.

Mencegah Kebakaran Gambut:

Mencegah kebakaran gambut berarti membalik faktor pemungkin atau penguat risiko kebakaran menjadi faktor pemustahil atau pelemah risiko kebakaran lahan gambut. Faktor pelemah risiko kebakaran tersebut adalah:

1. Pertahankan tingkat kebasahan gambut sepanjang tahun pada tingkat tinggi muka air (tma) kurang dari 40 cm dari

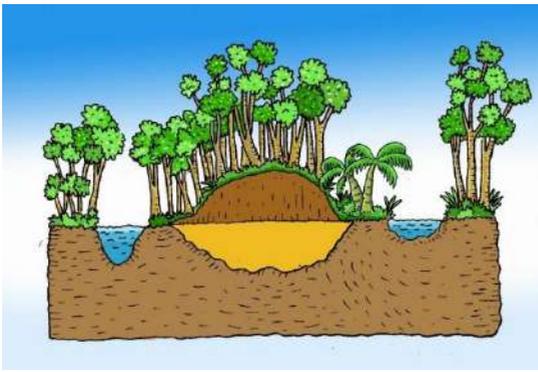
permukaan tanah; Ini berarti sebelum memasuki musim kemarau jumlah air harus tersedia lebih banyak;

2. Lahan dirawat dengan pemilik/ penguasa intens berada di lokasi; Intensitas berperan sebagai kontrol/keterjangkauan mengawasi suatu unit lahan;
3. “Mengibarkan bendera kebersamaan”; bangun aliansi kerja sama, baik internal dalam petak-petak hamparan parit, maupun eksternal secara keseluruhan hamparan gambut. Kerjasama antara semua pihak – petani kecil, penguasa tanah besar, pemegang HGU, pemerintah desa dan Instansi kehutanan.

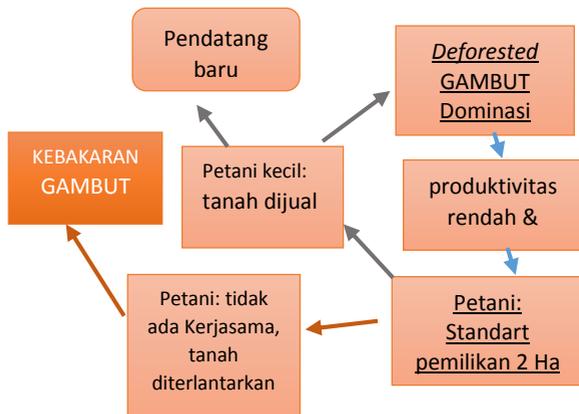
Tiga faktor tersebut membentuk segitiga sama sisi saling berhubungan. Ketiganya dapat diinternalisasi dalam satu kelembagaan Regu Peduli Air (REPAIR).

Dalam konteks kerja-kerja PS BHL Muara Medak, **REPAIR** adalah prasyarat. Sebagai pengelola unit areal seluas 3.500 Ha yang menjadi bagian dari lanskap (bentang lahan) gambut Muara Medak, maka Repair tidak bisa hanya ada di dalam, tetapi harus ditularkan kepada penguasa-penguasa lahan lainnya, yang juga mengalami kebakaran dalam tahun-tahun sebelumnya dan 2019; PT. RHM, PT Hutan Bumi Lestari, HKm Medak Lestari, PT. Tiesco CP, dan areal tertentu di bawah pengelolaan KPH Lalan Mendis.

Tanpa satu tekat Repair gambut dalam lanskap yang sama, kebakaran akan terus mengancam; usaha ekonomi produktif apapun akan berisiko tinggi, dan rantai yang membentuk lingkaran tidak berujung pangkal akan kian menguat.



Gambar 9: pelemah risiko kebakaran



Gambar 10: lingkaran tidak berujung pangkal petani kecil

6. GAPOKTAN MERANTI WANA MAKMUR: PERJUANGAN MENJADI PETANI

6.1. Mencermati lanskap: Menjadi Petani Adalah Pilihan

Kampung TPB:

Kampung TPB merupakan bagian dari Dusun VI, Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi ini berjarak kurang lebih 10 km dari pusat desa, 120 km dari Sekayu, ibukota kabupaten, dan 225 km dari Kota Palembang. Kampung TPB tergolong sepi. Rumah-rumah semi permanen, beberapa hanya berbentuk gubuk dari kayu, berjumlah tidak lebih dari 30 unit. Jarak antar rumah terpisah oleh halaman yang berfungsi juga sebagai kebun sayur-mayur.

Desa Bintialo dan sekitarnya merupakan wilayah konsesi berbagai perusahaan; PT Sentosa Bahagia Bersama, PT Bumi, Persada Permai I dan II, PT. Rimba Hutani Mas, PT Wahana Agro Mulia, masing-masing adalah pemegang konsesi HTI; PT. Berkas Sawit Sejati, PT Pinago, dan PT. Musi Banyuasin Indah yang menguasai izin HGU kelapa sawit; Conoco Phillips (Grissik), Ltd yang melakukan eksploitasi gas. Keramaian tersebut adalah penanda bahwa wilayah ini merupakan sumber produksi hasil bumi yang melimpah.

Berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari perkampungan merupakan jalan poros yang ramai. Jalan yang dibangun dari batu diperkeras dan cukup terpelihara ini dilalui oleh beragam kendaraan pengangkut batubara, buah kelapa sawit, kendaraan operasional berbagai perusahaan perkebunan dan hutan tanaman, serta pengangkut minyak yang ditambang oleh masyarakat.

Asal penduduk dan motif:

Perjalanan hidup dari salah satu warga sedikit banyak mewakili perjalanan hidup dari rata-rata penduduk kampung TPB.

Ditanya tentang asal, Dirman malah mengisahkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dia berasal dari salah satu kampung orang bugis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. "Lahan di kampung saya sudah sempit. Anak-anak generasi baru seperti saya tidak bisa lagi bertani. Padahal, harapan hidup kami ada pada usaha pertanian itulah. Saya memutuskan merantau ke Sumatera Selatan, membeli lahan murah dari kenalan teman sekampung. Setelah menanam kelapa sawit seluas 6 hektare, ternyata lahan itu adalah areal HTI PT. RHM. Kami diminta pergi. Kami melawan. Kami beberapa kali melakukan demo ke Palembang dan juga Jakarta. Sepulang dari demo terakhir di Jakarta, malah lahan sudah digusur PT", ucap Dirman sedikit getir. Saya dan beberapa teman sekampung datang kemari tahun 2012/2013. Kami membuat pondok untuk tempat tinggal dan menanam karet dan sedikit kelapa sawit. Setelah kejadian kebakaran tahun 2015, kami baru tahu kalau ternyata areal ini kawasan hutan lindung. Beberapa teman waktu itu sudah pergi, karena takut. Pondok dan lahan kebun mereka tinggalkan".

Sistem Penghidupan:

Mengikuti kebiasaan dari penduduk asli, sebagian besar para warga pendatang menanam tanah kehutanan yang dibukanya dengan karet. Ada juga warga pendatang yang membeli kebun karet penduduk setempat. Kini harga karet jatuh. Sebagian kebun

karet diterlantarkan, karena pemiliknya beralih kemata pencarian lain, seperti berdagang, atau bekerja di pertambangan minyak ilegal kecil-kecilan yang tersebar di kebun-kebun penduduk ex-pertambangan minyak kolonial.

Segelintir penduduk mengambil jalan lain, seperti halnya seorang warga senior asal Jawa.

“Dari tanaman jengkol, pisang, dan jeruk, ditambah tanduran semangka, kadang ada juga cabe, saya bisa menghidupi anak istri. Tidak harus ngandalkan karet saja”, lanjut Mbah Didik. “Kalau kita benar-benar jadi petani, tanah-tanah ini akan menghidupi kita Mas, asal mau bekerja keras dan sabar..... Masalahnya di sini ini masih banyak pilihan pekerjaan lain (tambang minyak ilegal) yang gampang mendapatkan uang...”



Gambar 11. *Mix farming* di Desa Lubuk Bintialo

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm):

Pada tahun 2018 ZSL datang menjembatani permasalahan pelik yang terjadi antara warga pendatang yang menggarap tanah kehutanan secara ilegal dengan pihak Kehutanan, dengan program HKm. Warga kemudian didampingi membuat kelompok tani HKm. Di kampung TPB jumlah anggota kelompok 47 orang.

Bulan November 2018 SK HKm keluar dan diserahkan di Palembang oleh Presiden Jokowi kepada para kelompok tani.

“Kalau dulu, jika ada orang datang kami semua ketakutan, lain sekarang pasti membawa harapan”, sapa Pak Janu, bukan nama sebenarnya, dalam logat Jawa yang masih kental. “Sekarang kami sudah mulai jadi petani lagi. Tetapi ya masih sendiri sendiri.”

Luas HKm seluruhnya 490 Ha., tersebar dengan luas berbeda-beda. Di sini areal TPB luasnya 185 ha, di Talang Jerukan seluas 235 ha, di Talang Sungai Kelukup 33 ha, di Talang Sungai Tenam 30 ha, dan di Talang Sungai Kapas 7 ha. Semuanya didominasi kebun karet. Dengan harga karet sekarang yang sangat rendah banyak kebun yang diterlantarkan karena pemiliknya mencari penghidupan dari sumber nafkah lain. Di Talang Jerukan anggota HKm sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan Conoco melakukan rehabilitasi DAS.



is: [redacted] menampilkan salah satu lahan areal kerja HKm: kebun jagung, kebun karet, kebun sayur (kiri); Anak petani HKm menatap bibit pinang yang diproduksi kelompok orang tuanya (kanan)

Hutan Pangan.

Kegiatan HKm Meranti Wanatani Makmur (MWM):

Salah satu fokus kegiatan dari kelompok tani hutan Meranti Wanatani Makmur (MWM) adalah persemaian. Persemaian dirancang untuk dapat memproduksi 40.000 bibit. Dalam perencanaan awal, sebagian bibit akan dijual untuk dijadikan modal kelompok dan sebagian lainnya akan digunakan untuk kegiatan penanaman oleh anggota kelompok.

Teknik membangun persemaian dibantu Balai Litbang LHK Palembang. Selain persemaian, anggota HKm juga memiliki beberapa kegiatan lain, yaitu penanaman pohon-pohon penghasil pangan (buah) dalam rangka rehabilitasi DAS dan uji coba budidaya porang (*Amorphophallus muelleri*). Porang dalam beberapa tahun terakhir sedang naik daun. Umbi porang di ekspor ke Jepang, Taiwan, dan Korea untuk diolah menjadi bahan makanan.

Kelompok tani hutan dan masalah partisipasi:

Inti permasalahan yang muncul dari evaluasi tahun pertama ini adalah bahwa kelompok HKm tidak menghadapi masalah teknis dalam mengembangkan komoditas. Namun, sebagai sebuah kelompok, gerakannya terlihat melambat karena hubungan antar orang belum terkelola (aspek kontrol). Ada warga yang merasa tidak dilibatkan. Sedangkan pembagian kerja, aturan kerja dan tanggung jawab tidak berjalan karena warga tidak biasa bekerja sama (aspek budaya) dan tidak memiliki kaitan ekonomi khusus satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang mau diatur (aspek kontrol). Aspek kontrol tidak berjalan antara lain karena kurangnya sentuhan dari pembina pemerintah.

Pemahaman tentang kelemahan diri sendiri menjadi bahan rujukan untuk melangkah selanjutnya. HKm memberikan jalan

kebersamaan, jalan kesejahteraan yang bisa jadi tak disangka-sangka. Bak kata-kata bijak, “Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersamasama.”

6.3. Menjaga Lanskap: Aksi Bersama Adalah Alat Komunikasi.

Penghalang jalan bagi kendaraan HKm, sebagai pelajaran dari aksi selama 2019, adalah pada aspek bagaimana menegakkan aturan main (kontrol) dan menciptakan suasana yang mendukung aturan main tersebut dapat bekerja (kultur). Inovasi adalah senjata untuk meredam persoalan ini.

Berdasarkan potensi situasi internal dan eksternal HKm, paling tidak tersedia 2 (dua) cara untuk kembali menggerakkan kendaraan HKm: Pertama, temukan dan angkat kegiatan usaha (komoditas) yang bersifat khas atau unggulan lokal. Kedua, jalin kerja sama yang bersifat kontraktual dengan para pihak; berbagai perusahaan.

Usaha Komoditas khas/ unggulan lokal:

Salah satu komoditas yang berpotensi menjadi penciri HKm MWM adalah keberadaan durian hutan dan *tampui*. Durian hutan, dalam bahasa lokal disebut durian daun (*Durio oxleyanus*); dian imbe, akhir-akhir ini banyak dicari karena cita rasa dan bentuknya yang khas. Permintaannya selalu lebih tinggi dari pasokan, karena masih bersumber pada alam. Begitu pula dengan *tampui* (*Baccaurea macrocarpa*) jenis buah lokal setempat, meski tidak sepopuler duku, kekhasannya mengundang ketertarikan banyak orang. Dua jenis ini dapat ditanam bersama beragam jenis meranti dan manggeris, untuk menjadi penyusun kebun koleksi/arboretum. Konsep utama kekhasan ini dapat dikemas dalam bentuk arboretum ekowisata jenis lokal khas MuBa/Musi-

Banyuasin. Areal depan permukiman TPB berpotensi untuk menjadi zona ekowisata.

Kekhasan lain yang dapat diciptakan adalah dengan membudidayakan dua jenis tumbuhan/ tanaman bawah, yaitu pasak bumi (*Eurycoma longifolia*) dan porang (*Amorphophallus muelleri*). Jika dibudidayakan secara masif di bawah tegakan karet, maka potensi hasil dan keterlibatan anggota dapat dimaksimalkan.

Menjalin kerjasama:

Sumber energi lain untuk menggerakkan kendaraan HKm adalah ikatan kerja sama dengan para pihak. Selain pintu masuk skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi merupakan potensi pasar bagi usaha HKm. Kebutuhan sayur-mayur, buah-buahan, bibit tanaman penghijauan dari masing-masing perusahaan adalah potensi pasar. Mengambil pelajaran dari langkah aksi yang lalu, maka kerja sama dengan para pihak ini sebaiknya di bawah payung kerja sama yang bersifat kontraktual, antara kelompok HKm dan pihak perusahaan. Keputusan untuk bekerja sama atau tidak harus merupakan keputusan bersama, agar tanggung jawab dan manfaat dipikul dan dinikmati bersama.

Posisi dan Peran Pendamping:

Pembahasan kampung TBS desa Lubuk Bintialo dengan Hutan Kemasyarakatannya dan kelompok Meranti Wanatani Makmur (MWM) dilakukan dengan berjarak, layaknya sebuah evaluasi. Karena pengamat tidak terlibat langsung di dalam proses pengembangan kelompok dan kegiatan HKM.

Permasalahan kinerja Kelompok MWM dapat dikembalikan pada ciri komunitas warga pendatang yang kekurangan perekat sosial diantara warganya, yang tercermin dari kesulitan warga untuk

bekerjasama. Pada fase 'Mencermati' ciri komunitas ini harus sudah tercium, dan diantisipasi oleh pendamping dengan kiat-kiat khusus. Berlandaskan rasa-senasib warga yang "terjebak" di Kawasan Hutan Negara pendamping dapat mendorong berkembangnya rasa-sepenanggungan dan kerjasama diantara warga. Sehingga pada fase-fase penting berikutnya yang menuntut kerjasama (anggota MWM), warga dan anggota kelompok sudah mulai terkondisikan.

7. KUD SARI USAHA: HARMONI PETANI DAN KEHIDUPAN ALAM LIAR HUTAN BAKAU

7.1. Mencermati Lanskap: Maha Taman Lahan Basah

Desa Karang Sari dan KUD Sari Usaha:

Desa Karang Sari terletak di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Sumatera Selatan. Desa ini merupakan perkembangan dari unit-unit transmigrasi tahun 1990 yang bercorak wilayah perairan. Dalam perkembangannya, Kabupaten MUBA dipecah menjadi Kabupaten MUBA dan Kabupaten Banyuasin. Unit-unit transmigrasi yang berkembang menjadi desa-desa kemudian terbagi ke dalam kedua kabupaten tersebut. Akses menuju desa dari Kota Palembang dapat ditempuh melalui dua titik keberangkatan sungai; Dermaga Simpang PU dengan waktu tempuh 3 jam dan Jembatan Ampera dengan waktu tempuh 4 jam.

Warga Desa Karang Sari adalah bagian dari anggota koperasi unit desa (KUD) Sari Usaha (SU) yang kebetulan berpusat di Karang Sari. Anggota KUD sebanyak 1.178 kepala keluarga, tersebar pada 17 desa dalam wilayah kecamatan Lalan Kabupaten Muba dan Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.

Sistem Penghidupan:

Penghidupan desa-desa yang sebagian warganya menjadi anggota KUD SU di Kecamatan Lalan dan Karang Agung Ilir mencerminkan jejak unit usaha transmigrasi. Jika dulu semua areal transmigrasi dirancang untuk bertani tanaman semusim, padi dan palawija, kini keragaman usaha tani di desa-desa telah menggambarkan kesesuaian perkembangan komoditas dengan tapak ekologisnya. Budidaya padi sawah dan jagung terlihat di Desa Karang Sari, Sari Agung, dan Sri Karang Rejo. Desa-desa yang dalam perkembangannya kurang sesuai membudidayakan tanaman semusim beralih menjadi usaha kelapa dalam dan kelapa sawit, seperti terlihat di Desa Mekar Sari dan Karya Mukti. Sebagaimana karakteristik wilayah sekitar perairan, pertanian sawah dibatasi oleh situasi pasang surut. Petani hanya dapat menanam padi maksimal 2 (dua) kali dalam setahun. Musim kemarau adalah masa bera bagi budidaya padi. Pada saat masa bera, petani padi terpaksa bekerja serabutan ke luar desa. Situasi berbeda dialami petani kelapa dalam dan kelapa sawit. Mereka dapat berusaha tani sepanjang tahun.

Sumber pendapatan lain di daerah sekitar Lalan dan Karang Agung Ilir adalah hasil-hasil alam seperti madu, kepiting, ikan, batang nibung, meskipun dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja.

Karakteristik dari petani transmigran yang telah ditempa menjadi orang-orang yang tangguh di dalam mengejar kesejahteraan, terlihat juga di dalam berkembangnya usaha burung walet (Ds. Karang Sari) dan kegiatan seperti pedagang pengepul. Kesan yang terlihat adalah komersialisasi kehidupan ekonomi yang sudah jauh, yang antara lain berdampak pada tumbuhnya perbedaan tingkat ekonomi antara warga.

Kemitraan Kehutanan:

KUD SU telah memperoleh SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) pada tahun 2018, untuk areal seluas 9.135,5 ha. Areal kerja kemitraan mereka termasuk ke dalam formasi lahan basah. Areal kerja KUD SU yang bermitra dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan/ KPH Lalan Mendis ini memiliki posisi ekologi-ekonomi strategis. Sebelah timur dan utara membentang Taman Nasional (TN) Sembilang. Sebelah barat dan selatan merupakan areal IUP-HPHTI PT Sumber Harapan Pratama. Sebelah selatan diusahakan oleh perkebunan kelapa sawit PT Raja Palma. Karenanya, posisi ini dapat diperankan sebagai penyangga bagi taman nasional.

Biofisik ekologis areal kerja kemitraan pada tahun 2019 menampilkan 2 (dua) status dominan, yaitu: 1) formasi hutan mangrove primer dan 2) areal semak belukar bekas tebangan hutan alam. Hutan mangrove menyebar mengikuti jalur sekitar sungai batang tengkorak, sungai buntut buaya, dan sungai air tawar. Areal semak belukar merupakan bekas areal tebangan HPH pada tahun 1980-an. Kayu pada areal tersebut turut dieksploitasi masyarakat pada tahun 1990-an hingga berhenti pada tahun 1997



Gambar 13. Rimba nipah menambah eksotisme lahan basah

akibat kebakaran. Kejadian kebakaran kembali terulang pada tahun 2010 dan 2015.

Formasi hutan mangrove didominasi oleh jenis nipah (*Nypa fruticans*) pada jalur pinggir sungai, kemudian diikuti bakau (*Rhizophora mucronata*), putut (*Bruguiera gymnorrhiza*), dan jamon (*Xylocarpus granatum*). Sementara, pada areal semak belukar bekas tebang didominasi oleh vegetasi kelompok paku-pakuan dan rumput berukuran besar khas lahan basah, antara lain: prumpung (*Phragmites karka*), belidang (*Fimbristylis annua*), paku udang (*Stenochlaena palustris*), dan paku laut (*Acrostichum aureum*). Pada areal bekas tebang masih dapat temukan vegetasi pohon. Jenis nibung (*Oncosperma tigillarum*), laban (*Vitex pubescens*), kayu ara (*Ficus spp.*), merbau (*Intsia sp*), dan pulai rawa (*Alstonia pneumatophora*) terlihat menyebar dalam jumlah sedikit. Dua situasi ekologis areal kemitraan ini menunjukkan sejarah pemanfaatan berciri *open access* (aspek kontrol) dan kultur kehidupan ekstraktif masyarakat sekitarnya.

7.2. Transformasi Lanskap: Menata Lahan Basah Adalah Menata Manusia.

Areal Kerja Kemitraan dan Zonasi:

Berdasarkan karakteristik ekologis dan beragam potensi yang dipelajari pengurus KUD bersama pendamping, areal kerja kemitraan dibagi menjadi 2 (dua) zona, yaitu budidaya dan lindung. Zona budidaya seluas 3.534,75 ha direncanakan sebagai areal pengembangan agroforestry kelapa-sengon. Zona lindung seluas 5.600,75 ha dibagi lagi menjadi sub-zona untuk pemanfaatan madu, perikanan tangkap, dan pemanfaatan kepiting.

Telah dikemukakan bahwa komunitas subyek pengembangan Hutan Kemitraan PS ini adalah masyarakat budaya transmigran

yang sistim penghidupannya sudah sangat komersial, secara sosial sudah terbagi-bagi dalam golongan kaya-miskin, serta bersifat gigit mengejar kesejahteraannya. Di dalam budaya inilah usaha PS ingin dikembangkan.

Karenanya, penggerak kendaraan PS dalam situasi seperti itu adalah rasionalitas ekonomi bisnis. KUD SU disarankan untuk segera membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan menata areal kerja sampai pada tingkat petak usaha masing-masing anggota/ individu.

Dari zonasi tersebut terdapat paling tidak 3 (tiga) potensi usaha PS yang dapat dikembangkan KUD SU, yaitu agroforestry, madu, dan hasil perikanan (ikan, kepiting, udang). Usaha Perhutanan Sosial (UPS) agroforestry berbasis pengolahan lahan, sedangkan UPS madu dan perikanan berbasis pengelolaan lanskap. UPS agroforestry membutuhkan penerahan modal, pengawalan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kolektivitas anggota. UPS madu dan perikanan memerlukan aplikasi inovasi IPTEK dan kolektivitas.



Gambar 14. Koloni madu sialang di sekitar Sungai Sampan

Keseimbangan antara Pemanfaatan dan Kelestarian:

Tantangan terbesar UPS KUD SU adalah penciptaan dan penguatan aspek kontrol. Bagaimana mengatur kepentingan, potensi, dan perilaku anggota dalam jumlah yang banyak dan tersebar? Bagaimana memastikan sumber daya alam pada areal kerja kemitraan tidak lagi *open access*? Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab apabila rencana kerja telah dilakukan dan dievaluasi.

Kegiatan di zona budi daya dengan pengembangan agroforestry merupakan tantangan dan menuntut rancangan aturan main yang kuat (kontrol) mengingat areal kerja kemitraan berbatasan langsung dengan TN Sembilang. Terutama, karena budaya warga ex-transmigran yang mengutamakan tanah pertanian dan bila mungkin berkaitan erat dengan pemukiman.

Tantangan lainnya adalah pada usaha berbasis ekstraktif zona lindung. Areal kerja kemitraan ini berjarak kurang lebih satu jam menggunakan *speed boat*, dari Desa Karang Sari sebagai pusat pengurusan kelompok. Sementara, praktik pemanenan kepiting bakau, ikan, batang nibung, dan madu selama ini dilakukan oleh individu/ kelompok masyarakat di luar keanggotaan KUD, memperlihatkan ciri *open-access*. Kondisi pemanfaatan yang berciri *open access* ini cepat atau lambat akan berdampak pada pemanfaatan yang melampaui daya dukung sumberdaya alam tersebut.

Pada saat tulisan ini disusun, KUD SU telah mengabarkan untuk memulai kerja-kerja usaha dengan membangun semacam demplot *agroforestry*. Kerja mandiri tersebut terlaksana melalui pengaturan potensi dana dan kolektivitas anggota, sehingga terbentuk keswadayaan.



Gambar 15. Lahan sawah yang ditanami *agroforestry* padi-jagung-jelutung

Posisi dan Peran Pendamping:

Pembahasan Desa Karang Sari dan KUD Sari Usaha juga dilakukan layaknya sebuah evaluasi, karena pihak pengamat dan penulis tidak terlibat di dalam proses-proses pengembangan disana. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, disini komunitas desa yang di dampingi sudah jauh terlibat di dalam kegiatan komersial. Sehingga warga sudah terbagi-bagi dalam kedudukan ekonominya. Suatu kondisi yang biasanya menyulitkan kerjasama diantara warga. Padahal kerjasama tersebut yang sangat dibutuhkan: pertama, di dalam rangka mencari jalan pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih produktif bagi semua kalangan warga; kedua, memastikan agar sumberdaya alam tidak jatuh kedalam kondisi 'open access', dengan cara mengatur warga di dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.

Karena itu sangat ditekankan pentingnya Rencana Usaha PS serta rancangan aturan main bagi anggota KUD SU yang kuat. Serta pentingnya bahwa RUPS dan aturan main bagi anggota dibangun bersama oleh para anggota sehingga ada persamaan rasa berkepentingan dan memiliki.

Penting juga diperhatikan, tekanan yang harus diletakkan oleh KUD SU di dalam kemitraan dengan Kehutanan ini pada kegiatan-kegiatan ekonomi, bisnis yang rasional di dalam konteks ekologisnya.

8. EPILOG: MASYARAKAT ADALAH PEMBELAJAR PERHUTANAN SOSIAL TERBAIK

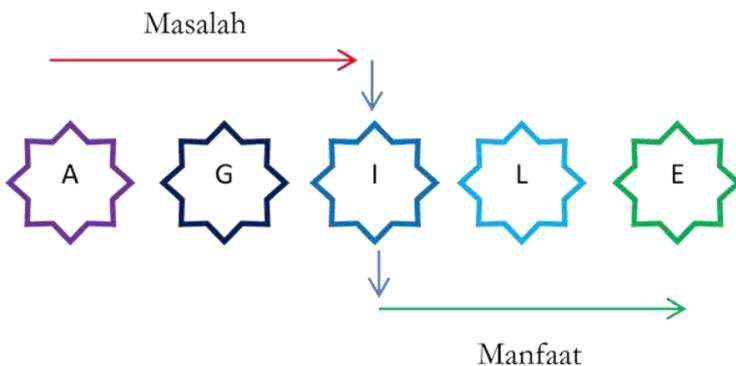
Perhutanan Sosial menawarkan pencapaian kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan melalui jalan membangun/ mengelola hutan dalam kebersamaan. Sementara, situasi umum masyarakat pedesaan kini dicirikan oleh kebersamaan/ kolektivitas yang mulai pudar dan rasa saling curiga yang mulai meninggi. Di sini lah tantangan peran pendamping/ fasilitator/ penggerak PS: mengajak orang-orang agar mau berjalan bersama-sama; menyibakkan jalan gelap agar terang; membawakan bekal agar tidak putus asa.

Mendampingi dan menggerakkan usaha PS harus dimulai dari hal yang sederhana, nyata dari usaha pemahaman masalah hingga usaha bersama mencari manfaat:

Langkah-langkah Amati dan Gali dalam proses AGILE adalah seperti mengikuti aliran air masalah: Di hulunya usaha pemahaman aspek komoditas pada petak kebun yang dikuasai individu/ rumah tangga ☞ kemudian menuju pemahaman masalah pada aspek kontrol (kemampuan dan keberlanjutan usaha) ☞ yang berlanjut pada hilir berupa pemahaman aspek kultur (nilai-nilai, sikap dan perilaku masyarakat, dukungan pemimpin, dan lain-lain).

Langkah Intimkan merupakan titik perubahan/ transformatif, mengubah masalah menjadi manfaat. Langkah Intimkan adalah berupa menyusun rencana-rencana, membuat komitmen perubahan, secara bersama sebagai sebuah kelompok.

Lakukan dan Evaluasi mengikuti aliran manfaat. Aliran manfaat harus dipastikan mencapai tujuannya, sebagai hasil paling nyata yaitu komoditas dan pada tingkat paling sederhana yaitu kepada individu/ rumah tangga. Dengan harapan bahwa di dalam prosesnya aspek kultur akan ikut bertransformasi.



6: Aliran pandangan pendamping/penggerak usaha PS dalam skema AGILE

Mendampingi dan menggerakkan PS berkuat dengan harapan-harapan, ketakutanketakutan, ancaman, konflik laten, tarikan kepentingan, rasa ketidakadilan, ketidakpuasan, ketidakpercayaan, bahkan rasa apatis di dalam masyarakat. Dalam situasi demikian pendamping harus menjadi pendengar yang baik, selalu berusaha untuk memahami, menjaga asa dan menumbuhkan tunas-tunas baru harapan masa depan.

Pendampingan PS tidak boleh lagi mengulangi kesalahan masa lalu rimbawan, yaitu menawarkan opsi menuju kesejahteraan berdasarkan kerangka berpikir birokrat yang kaku dan cenderung membatasi opsi tindakan. Dulu masyarakat diposisikan sebagai

pekerja, sebagai buruh, sebagai orang yang layak disantuni, sehingga jika melakukan kerja-kerja di hutan harus diarahkan, karena dianggap tidak berpengetahuan dan perusak.

Tidak ada satu senjata yang berlaku untuk memecahkan semua masalah di semua tempat. Masing-masing lokasi pendampingan memiliki karakteristik, permasalahan unik, isu aktual, dan potensi yang patut dipahami. Seorang pendamping yang memiliki latar belakang minat dan pengetahuan tentang komoditas minyak kayu putih, misalnya, tidak boleh memaksakan bahwa semua lokasi harus menanam minyak kayu putih. Tugas pendampingan adalah memberikan opsi-opsi, membuka cakrawala berpikir untuk menjadi pertimbangan bagi kelompok masyarakat dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan mandiri. Tugas mulia tersebut dijalankan dalam sikap kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Jika saja AGILE K3 TranS SC2 digunakan dalam semua tahapan program perhutanan sosial: kebijakan, pengusulan, verifikasi, pengesahan, dan implementasi, bisa jadi kita akan segera memasuki era PS generasi keempat. Generasi keempat PS adalah era masyarakat pengelola hutan menjadi panglima.

Menurut penulis, PS generasi keempat tidak lagi bertumpu pada pencapaian jumlah akses perhutanan sosial, yang mengutamakan pemulihan kawasan hutan. Namun ia adalah PS yang dibangun pada tanah yang subur sehingga mengundang investasi; diberikan kemudahan akses permodalan dan regulasi; disiapkan peta jalan menuju hutan lestari; diserahkan keputusan pengelolaannya kepala kelompok masyarakat itu sendiri, apakah menjadi korporasi, koperasi, atau mandiri.

Jika generasi pertama dan kedua PS memiliki semboyan *forest for people* dan generasi ketiga bisa jadi cocok dengan moto *forest with people*, maka generasi keempat PS seharusnya *forest from people*. Semoga.

LAMPIRAN

Situasi nasional terkait hutan yang memengaruhi perkembangan PS dalam konteks perkembangan PS, dengan meminjam periododesasi Fisher et al (2019)

Periode	Peristiwa	Tanggapan
1970-an s.d. 1980-an	<ul style="list-style-type: none"> • Orde lama mewariskan masalah keterpurukan ekonomi; Orde baru membutuhkan aset dan investasi untuk pembangunan • Orde baru mengeluarkan UU No. 1 dan 5 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Kehutanan, UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri • Pembentukan Departemen Kehutanan pada tahun 1983 • Masyarakat internasional mendorong <i>forest for people</i>. Badan dunia mendukung proyek PS 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan secara umum dikelola oleh negara. Hutan konservasi dan lindung oleh badan-badan pemerintah. Hutan produksi diserahkan pengelolaan kepada perusahaan pemegang Hak perusahaan hutan (HPH). Pada akhir 1980-an, muncul hutan tanaman industri (HTI). • HPH diwajibkan melaksanakan HPH Bina Desa melalui SK Menhut No.691/KPTS-II/1991 • PS dalam bentuk proyek-proyek yang didanai badan-badan asing • Era <i>timber-based management</i>

Pertengahan 1990-an s.d. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Deforestasi skala luas; degradasi lingkungan • Menhut Djamiluddin sangat peduli dengan HPH Bina Desa • Tumbangnya orde baru: era reformasi. • Menhut Muslimin Nasution mengeluarkan slogan “hutan untuk kesejahteraan rakyat” • Reformasi sektor kehutanan: kebijakan desentralisasi dan devolusi • Presiden Megawati dan Menhut Prakosa mencanangkan <i>Social Forestry</i> • <i>Booming</i> komoditas • Marak <i>illegal logging</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • SK menhut No. 69/Kpts-II/1995 mengubah HPH Bina Desa menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan • SK Menhut No.622/Kpts-II/1995, aturan HKm pertama di Indonesia • SK No. 677/1998: HKm dapat akses kayu • UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan: Memuat pengakuan masyarakat adat, hutan untuk kesejahteraan rakyat, muncul istilah “hutan desa” pada penjelasan • Tahun 2001, istilah ‘Perhutanan Sosial’ disebut pertama sekali dalam nomenklatur Dirjen Menhut • SK 31/2001: Masyarakat adalah pelaku utama HKm. Desentralisasi kepada pemerintah kabupaten • <i>Social forestry</i> menjadi payung 5 program prioritas Dephut (2002) • P.01/Menhut-II/2004:Pemberdayaan masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka SF • PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan: Areal tertentu
-------------------------------------	---	--

	<p>di kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai HKm, Hutan Desa (HD), Hutan Adat. Pemberdayaan dengan HKm, HD, dan Kemitraan. Hutan produksi dapat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permenhut P.49/2008, diubah P.14/2010, diganti P.53/2011 semua tentang HD • Permenhut P.37/2007, diubah P.13/2011, diubah P.52/2011 semua tentang HKm • Permenhut P.23/2007, diubah P.5/2008, diubah P.55/2011 semua tentang HTR
<p>2012 s.d. sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan hak-hak masyarakat adat: Putusan Mahkamah kontitisi No.35/2012 • Dialog konstruktif para pihak perlu penyederhanaan birokrasi perizinan skema-skema PS • Hasrat untuk memperkuat kelembagaan KPH • Isu reforma agraria mengemuka • Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam RPJMN 2015- 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen P.89/2014 tentang HD, P.88/2014 tentang HKm, P.31/2013 tentang HTR, P.39/2013 tentang pemberdayaan masy. Melalui kemitraan kehutanan • Dibentuk Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kemen LHK • Permen LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial • Perdirjen No.6/2018 tentang Juknis Kemitraan Konservasi

2019 menargetkan PS seluas 12,7 juta ha	• Permen LHK P.37/2019 tentang PS pada ekosistem gambut
• Marak terjadi karhutla, terutama di lahan gambut	• Permen Desa No.11/2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Altrichter, H., Kemmis, S., Mctaggart, R., & Zuber-Skerritt, O. (2002). **The concept of action research.** *The Learning Organization*, 9(3), 125–131. <https://doi.org/10.1108/09696470210428840>
- Arnold, J. E. M. (1986). Forestry for local community development and integrated forest management. In *Strategies, Approaches, and Systems in Integrated Watershed Management* (pp. 173–184). Rome: FAO Conservation Guide.
- Arnold, J. E. M. (1992). *Community Forestry: Ten Years in Review. Community Forestry Note 7, Rev. 1.* Rome: FAO.
- Barsimantov, J. A. (2010). Vicious and virtuous cycles and the role of external non-government actors in community forestry in Oaxaca and Michoacán, Mexico. *Human Ecology*, 38(1), 49–63. <https://doi.org/10.1007/s10745-009-9289-3>
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>
- Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Issue Supplement), S95–S120.
- de Jong, W. (2012). Discourses of community forestry. In B. Arts, S. van Bommel, M. Ros-Tonen, & G. Verschoor (Eds.), *Forest-people interfaces Understanding community forestry and biocultural diversity*. Wageningen Academic Publishers. <https://doi.org/10.3920/978-90-8686-749-3>
- De Royer, S., Van Noordwijk, M., & Roshetko, J. M. (2018). Does community-based forest management in Indonesia devolve social justice or social costs? *International Forestry Review*, 20(2), 167–180. <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>
- Fisher, M. R., Dhialuhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economics, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*,

3(1), 152. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>

Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.

Galudra, G. (2019). Focusing on facilitation: Issues and challenges of capacity development in Indonesia's social forestry reforms. *Forest and Society*, 3(1), 133. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5995>

Gilmour, D. (2016). *Forty years of community-based forestry*. FAO.

Górriz-Mifsud, E., Secco, L., & Pisani, E. (2016). Exploring the interlinkages between governance and social capital: A dynamic model for forestry. *Forest Policy and Economics*, 65, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.006>

Groot, A., & Maarleveld, M. (2000). Demystifying Facilitation in Participatory Development. *Gatekeeper Series*, (89).

Kartasubrata, J. (1988). Program-program kehutanan sosial di Indonesia. *Jurnal Rimba Indonesia*, XXII(1–2).

Kemmis, S., & Wilkinson, M. (2002). Participatory action research and the study of practice. In B. Atweh, S. Kemmis, & P. Weeks (Eds.), *Action Research in Practice*. London and New Delhi: Routledge.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi. Edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipt.

Kurt Lewin. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues*.

Martin, E. (2016). *Kapital budaya petani dalam pelestarian hutan: Studi fenomenologis Orang Semende di dataran tinggi Sumatera Selatan*. Institut Pertanian Bogor.

Martin, E., & Galle, F. B. (2009). Motivasi dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga penanam pohon penghasil kayu pertukangan: Kasus tradisi menanam kayu bawang (*Disoxylum molliscimum* BL) OLEH MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA , BENGKULU (Motivation and Household Characteristics. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 6(2), 117–134.

- Martin, E., & Nurlia, A. (2010). Karakteristik sosial ekonomi penyebaran bambang lanang (*Michelia champaca*) di Sumatera Selatan. In T. Rostiwati, N. Mindawati, I. Aggraeni, S. Bustomi, & R. Effendi (Eds.), *Prosiding Workshop Sintesa Hasil Penelitian Hutan Tanaman 2010, Bogor 1 Desember 2010* (pp. 109–114). Bogor: Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan, Balitbang Kehutanan.
- Marzali, A. (2005). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mckay, S. (2011). Participatory Action Research, Community-Based. In *The Encyclopedia of Peace Psychology* (pp. 90–95). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1002/9780470672532.wbpep186>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. (J. E. Alt & D. C. North, Eds.). New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.2307/133271>
- Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. *World Development*, 29(2), 209–227. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00098-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00098-X)
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *American Prospect*, 13, 35–42.
- RECOFTC. (2013). *Community forestry in Asia and the Pacific Pathway to inclusive development*. Bangkok.
- Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Meijaard, E., Law, E. A., ... Struebig, M. J. (2019). Heterogeneous impacts of community forestry on forest conservation and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *People and Nature*, (March), pan3.25. <https://doi.org/10.1002/pan3.25>
- Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.-L., Sheil, D., Meijaard, E., ... Buck, L. E. (2013). Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(21), 8349–8356.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1210595110>
- Scholz, Roland W. (2000). Mutual learning as a basic principle of

- transdisciplinarity. In R.W Scholz, R. Haberli, A. Bill, & M. Welti (Eds.), *Transdisciplinarity: Joint Problem-solving among Science, Technology and Society. Proceedings of the International Transdisciplinarity 2000 Conference. Workbook II: Mutual Learning Sessions* (pp. 13–17). Zurich: Haffman.
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko, W., Sirait, M., & Evelyns, S. (2000). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Aditya Media.
- Suharjito, D., & Wulandari, C. (2019). A reflection of Social Forestry in 2019: Towards inclusive and collaborative government approaches. *Forest and Society*, 3(1), 137. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6099>
- Suhendang, E. (2004). *Kemelut dalam Pengurusan Hutan Sejarah Panjang Kesenjangan antara Konsepsi Pemikiran dan Kenyataan*. Bogor, Indonesia: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Vayda, A. P. (1983). Progressive contextualization: Methods for research in human ecology. *Human Ecology*, 11(3), 265–281. <https://doi.org/10.1007/BF00891376>
- Wiersum, K. F. (1999). *Social forestry: changing perspectives in forestry science or practice? Thesis Wageningen Agricultural University, the Netherlands*. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lah&AN=19990608844&site=ehost-live>
- Wulandari, C., & Kurniasih, H. (2019). Community preferences for social forestry facilitation programming in Lampung, Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 114. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6026>

TENTANG PENULIS



Edwin Martin lahir di Lahat, Sumatera Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana dari Program Studi Budidaya Hutan Universitas Bengkulu tahun 1999. Pada tahun 2000, penulis diterima sebagai peneliti di Balai Teknologi Reboisasi Palembang, bekerja dalam bidang silvikultur dengan peminatan agroforestry. Pada tahun 2002/2003, penulis memutuskan mengubah bidang kepakaran menjadi peneliti kehutanan sosial (*Social Forestry*), setelah beberapa kali plot ujicoba penelitian silvikultur yang ia dan rekan-rekannya kerjakan mengalami kegagalan akibat kebakaran, perambahan, vandalisme, dan inkonsistensi manajemen.

Tahun 2006-2018 ia melanjutkan pendidikan tingkat magister di Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), mengambil minat khusus pemodelan kualitatif yang diaplikasikan sebagai resolusi konflik masyarakat versus rejim kawasan hutan. Tahun 2012-2016, penulis melanjutkan studi S3 pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan IPB Bogor, fokus mempelajari sistem sosial-ekologis dan faktor budaya yang memengaruhi interaksi manusia-hutan. Sejak tahun 2017, sebagai peneliti Balitbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, ia aktif melaksanakan penelitian, mempublikasikan hasilnya, melakukan kerjasama dan melayani para pihak dalam isu restorasi gambut, kebakaran hutan dan lahan, dan perhutanan sosial.



ZSL
LET'S WORK
FOR WILDLIFE

Didukung oleh:



ISBN 978-623-95317-3-7

